



Laporan Tahunan

ANNUAL REPORT - 2021

PD. BPR ARTHA PRAJA

Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar

Telp. 0342-815533, Faks. 0342-815016

email : apb_08@yahoo.co.id



DAFTAR ISI

Halaman

Data Perusahaan	3
Visi, Misi dan Tujuan Utama Operasional	4
Ikhtisar Data Kinerja Perusahaan	5-6
Sekapur sirih	7
1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
1.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan	8
1.2 Tempat Kedudukan	8
1.3 Kepemilikan dan Permodalan Perusahaan	8
1.4 Pengurus Perusahaan	9-10
1.5 Struktur Organisasi Perusahaan	10
1.6 Susunan Pengurus dan Manajemen	11-14
2. LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA	
2.1 Perkembangan Usaha	15
a. Pendapatan	15
b. Beban Operasional	15-16
c. Laba Sebelum Pajak	16
d. Taksiran Pajak	16-17
e. Laba Bersih	17
Perkembangan Usaha Tahun 2015 s/d 2019	17
2.2 Rasio – Rasio Keuangan	17
2.3 Penjelasan Mengenai NPL dan Penyebab Utama NPL	17-18
2.4 Perkembangan Personalia	18-19
3. LAPORAN PENGELOLAAN USAHA	
3.1 Akvitas Utama	20
a. Penghimpun Dana	21-221
b. Penyaluran Dana	22
3.2 Informasi Lain	22
4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN	
4.1 Strategi	23
4.2 Kebijakan Perusahaan	
a. Peningkatan kualitas kinerja perusahaan	23-24
b. Peningkatan kualitas SDM	24
c. Kegiatan Promosi	24
d. Kegiatan Literasi, Edukasi dan Inklusi	24-25
4.3 Pengembangan Potensi dan Sumberdaya Perusahaan	
a. Pengembangan Teknologi Informasi	26
b. Perkembangan dan Target Pasar	26-27
c. Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor	28

4.4	Kerjasama Bank Artha Praja dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha	28
4.5	Informasi Lainnya	
a.	Kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham dalam Kelompok Usaha BPR dan perubahannya dari tahun sebelumnya juga ada.	28-29
b.	Keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, dan/atau antara pemegang saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas.	29
c.	Kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas termasuk bonus, tantiem, dan fasilitas lain.	29
d.	Perubahan penting lain yang terjadi di Bank Artha Praja dan/atau di kelompok usahanya yang mempengaruhi operasional Bank Artha Praja dalam tahun yang bersangkutan.	29
5.	LAPORAN KEUANGAN	
5.1	Cover Depan	30
5.2	Daftar Isi	31
5.3	Manajemen Letter	32-40
5.4	Surat Pernyataan Manajemen	41
5.5	Neraca	42
5.6	Laporan Laba Rugi	43
5.7	Laporan Perubahan Ekuitas	44
5.8	Laporan Arus Kas	45
5.9	Catatan Atas Laporan Keuangan	46-65
	Lampiran :	
1.	Rincian Kredit Yang Diberikan Jenis Penggunaan Berdasarkan Kualitas	66
2.	Kualitas Aset Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	67
3.	Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	68
4.	Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	69-70
5.	Rasio Perhitungan Kesehatan Bank	71
	Penutup	72

DATA PERUSAHAAN

NAMA	: PD. BPR ARTHA PRAJA
KEPEMILIKAN	: 100% milik Pemerintah Kota Blitar
DASAR HUKUM PENDIRIAN	: Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar
DASAR HUKUM OPERASIONAL	: Izin Usaha Perbankan diberikan oleh Gubernur Bank Indonesia No. 9/25/KEP.GBI/DpG/2007 tanggal 13 Juni 2007 di Jakarta.
MODAL DASAR	: Rp. 17.000.000.000,-
MODAL DISETOR	: Rp. 8.000.000.000,-
KANTOR PUSAT	: Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar Telp. (0342) 815533 Faks. (0342) 815016 email : apb_08@yahoo.co.id website : www.bankarthapraja.com
KANTOR KAS	: 1 (satu) Kantor Kas

VISI, MISI & TUJUAN UTAMA OPERASIONAL

Visi PD. BPR ARTHA PRAJA, yaitu :

- Meningkatkan kualitas sumber daya dan potensi-potensi yang ada di Kota Blitar dalam rangka penguatan ekonomi kreatif yang dilaksanakan secara proaktif, positif, bertanggung jawab serta profesional melalui lembaga perbankan daerah.

Misi PD. BPR ARTHA PRAJA, yaitu :

Bertindak sebagai motor penggerak dengan memperhatikan faktor kepercayaan masyarakat didalam menggalang seluruh kegiatan ekonomi, sebagai ujung tombak pelaksana ekonomi kreatif di Kota Blitar serta membina masyarakat dalam membangun perekonomian secara terpolo dan berkesinambungan sehingga mampu :

- Mengakomodir seluruh aspirasi nasabah dan masyarakat Kota Blitar.
- Menggalang kerja sama antar nasabah, antar kelembagaan dan instansi terkait serta Bank Umum demi kemaslahatan Nasabah.
- Membangun dan menumbuhkembangkan apresiasi dan kredibilitas lembaga, para nasabah dan seluruh masyarakat Kota Blitar.

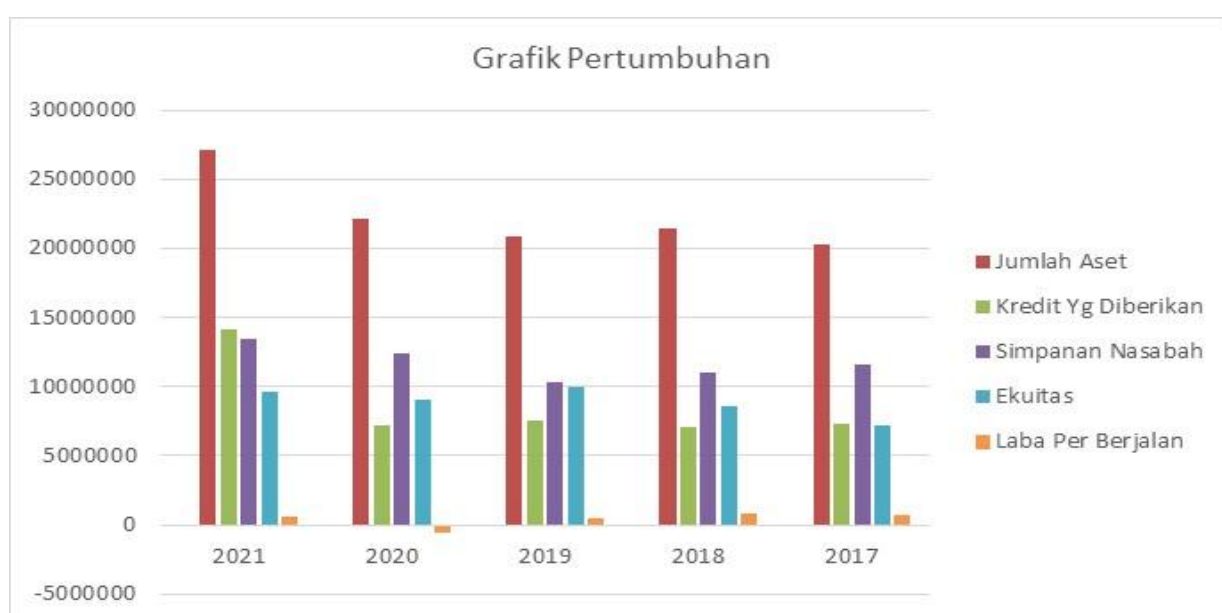
Tujuan Utama Operasional PD. BPR ARTHA PRAJA adalah untuk :

1. Membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam segi penambahan modal.
2. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha, serta memudahkan masyarakat Kota Blitar dalam penggunaan Jasa Perbankan.
3. Memudahkan masyarakat untuk transaksi dengan adanya sistem pelayanan jemput bola.

IKHTISAR DATA KINERJA PERUSAHAAN

(Rp. 1.000)

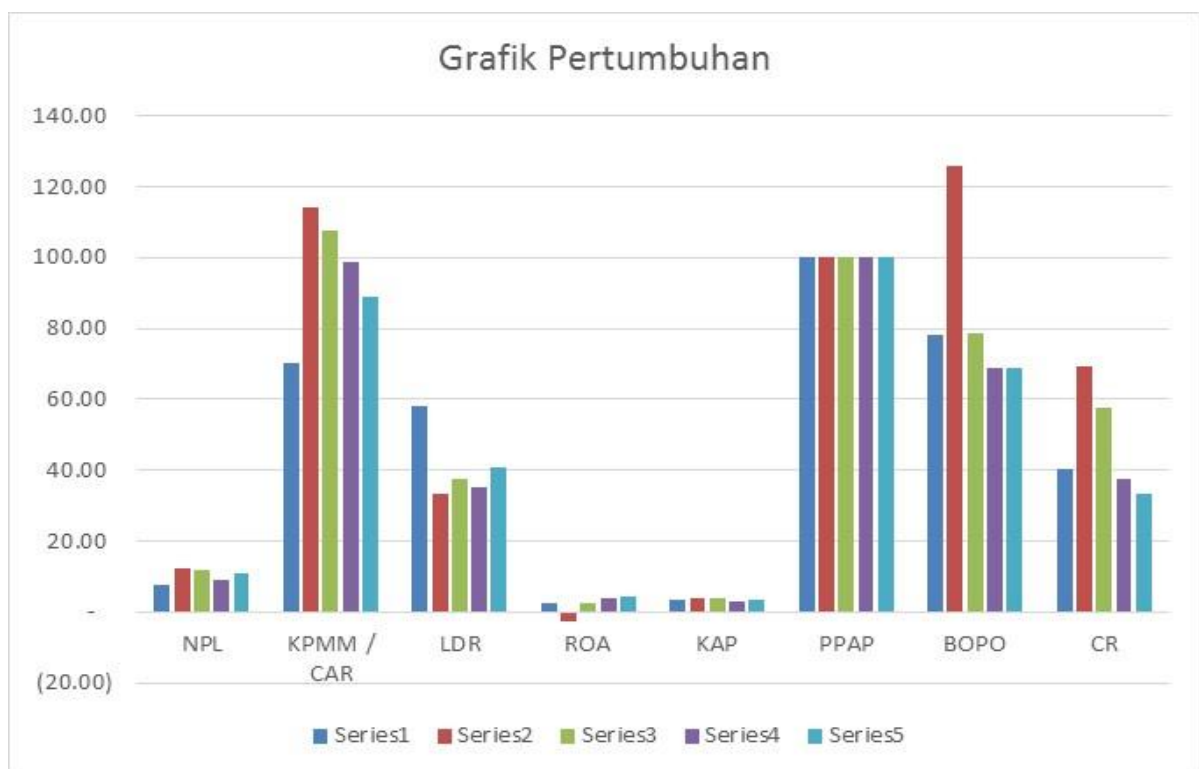
NERACA dalam ribuan rupiah	GROWTH 2021-2020	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah Aset	22.82%	27,172,936	22,124,635	20,808,656	21,401,601	20,325,537
Penempatan Pada Bank Lain	-9.52%	12,998,175	14,365,252	12,151,516	13,733,446	12,723,846
Kredit Yang Diberikan	96.23%	14,108,822	7,189,917	7,491,424	7,076,424	7,333,578
Simpanan Nasabah	8.13%	13,434,404	12,424,030	10,281,059	11,009,239	11,560,160
Simpanan Dari Bank Lain	3500000.00%	3,500,000	0	-	-	-
Pinjaman Diterima	0.00%	0	0	-	-	-
Ekuitas / Modal Inti	6.08%	9,566,946	9,018,697	9,916,169	8,523,530	7,232,692
Modal Yang DiSetor Pemkot	0.00%	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	6,500,000
Laba Periode Berjalan	-193.52%	548,250	(586,223)	444,643	788,577	711,054



(Rp. 1.000)

LAPORAN LABA RUGI dalam ribuan rupiah	GROWTH 2021-2020	2021	2020	2019	2018	2017
Pendapatan Bunga	6.01%	2,105,905	1,986,444	2,257,606	2,660,065	2,650,058
Beban Bunga	-4.32%	472,802	494,151	538,167	631,592	615,098
Pendapatan Operasional Lainnya	150.71%	545,316	217,509	214,592	104,164	119,956
Beban Operasional	-29.64%	1,602,794	2,278,097	1,403,724	1,271,826	1,290,964
Pendapatan Non Operasional	-36.28%	35,723	56,066	32,055	50,081	19,017
Beban Non Operasional	0.64%	63,098	62,694	105,198	101,862	144,025
Laba Sebelum Pajak	-193.36%	548,250	(574,923)	457,164	809,030	738,944
Taksiran PPh	-100.00%	0	11,300	12,521	20,453	27,890
Laba Neto	-193.52%	548,250	(586,223)	444,643	788,577	711,054

Rasio Keuangan (dalam %)	2021	2020	2019	2018	2017
Kredit Bermasalah / Non Performing Loan (NPL)	7.60	12.18	11.83	8.96	10.88
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) / CAR	70.12	114.04	107.64	98.71	89.10
Loan to Deposit Ratio (LDR)	58.24	33.08	37.50	35.16	40.93
Imbal Hasil Aset / Return On Asset (ROA)	2.40	(2.68)	2.26	4.01	4.13
Kualitas Aset Produktif (KAP)	3.50	3.82	3.86	2.79	3.38
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	78.29	125.79	78.55	68.86	68.81
Cash Ratio (CR)	40.49	69.07	57.80	37.29	33.31



Perbandingan Jumlah Kredit Bermasalah Terhadap Total Kredit	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah Kredit Bermasalah	1,071,807	875,923	886,001	650,358	831,534
- Kualitas Kurang Lancar	205,114	49,723	134,121	119,282	161,478
- Kualitas Diragukan	83,545	109,496	245,184	18,215	264,778
- Kualitas Macet	783,148	716,704	506,696	512,861	405,278
Total Kredit Yang Diberikan	14,108,822	7,189,917	7,491,424	7,257,933	7,552,722
% Perbandingan	7.60%	12.18%	11.83%	8.96%	11.01%

SEKAPUR SIRIH

Salam Sejahtera.

Adalah merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami dan segenap Sumber Daya Manusia yang berada di PD. BPR. ARTHA PRAJA manakala dapat terus bertahan, dan sanggup melalui tahun 2021 ini dengan baik. Karenanya di kesempatan selanjutnya, kami akan :

1. Terus memperbaiki diri (selalu berbenah), sehingga kami dapat tetap melayani segenap kebutuhan masyarakat di bidang perbankan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.
2. Tetap optimis dan senantiasa berupaya memasuki berbagai era dengan sangka baik agar dapat meraih hasil yang lebih baik, dan senantiasa bersinergi, serta senantiasa menjaga dan memupuk semangat transformasi yang telah ada dan terbangun, agar :
 - a. Kinerja keuangan PD. BPR. ARTHA PRAJA kembali menunjukkan pertumbuhan yang positif;
 - b. Pengendalian efisiensi dan eksekusi strategi dapat berjalan dengan baik kembali, yang dapat dibuktikan dalam keberhasilan menutup kerugian dengan melakukan berbagai inisiatif;
 - c. Jumlah customer base dapat terus ditingkatkan;
 - d. Kinerja perusahaan dapat kembali ditingkatkan.

Kesemua hal tersebut di atas harus senantiasa dilaksanakan dengan penuh kesadaran tinggi, agar perusahaan tetap mampu mewujudkan visi “meningkatkan kualitas sumber daya dan potensi-potensi yang ada di Kota Blitar dalam rangka penguatan ekonomi kreatif yang dilaksanakan secara proaktif, positif, bertanggung jawab serta profesional melalui lembaga perbankan daerah.” Visi yang merupakan salah satu kerangka cita-cita luhur **PD. BPR ARTHA PRAJA** agar menjadi salah satu BPR yang bermanfaat bagi kepentingan semua pihak yang terkait di dalamnya.



GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1) Sejarah Perkembangan Perusahaan

PD. BPR ARTHA PRAJA Kota Blitar (Perusahaan) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar. Perusahaan mendapatkan ijin usaha dari Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 9/25/KEP.GBI/DpG/2007 pada tanggal 13 Juni 2007 di Jakarta, selanjutnya Perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Agustus 2007 di Kota Blitar.

Sesuai dengan perijinan yang ada, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah menjalankan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat secara konvensional.

Seiring dengan perkembangannya, Walikota Blitar mempunyai inisiatif untuk memperkuat permodalan Perusahaan, dan hal tersebut diwujudkan dengan upaya:

1. Menambah modal disetor sebagaimana termaktub dalam Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/791/HK/410.010.2/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar. Penambahan Modal Disetor ini telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dengan Nomor 14/53/DKBU/IDAd/Kd tanggal 06 Februari 2012.
2. Melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, dengan menetapkan besarnya penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar sebesar Rp15.000.000.000,00 sehingga modal dasar menjadi sebesar Rp17.000.000.000,00. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2004 tentang perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar, maka pada tanggal 26 Juli 2021 Direktur Utama PD. BPR Artha Praja telah mengajukan Permohonan Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Penegasan Penggunaan Izin Usaha BPR Dengan Nama Baru kepada Kepala Kantor OJK Kediri. Dan permohonan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Nomor SR-39/KO.0402/2022 tanggal 25 Maret 2022 hal persetujuan pengalihan izin usaha dalam rangka perubahan badan hukum disertai perubahan nama. Karenanya pada kesempatan selanjutnya, **di tahun 2022 PD BPR Artha Praja akan berubah badan hukum dan nama menjadi Perumda BPR Kota Blitar.**

2) Tempat Kedudukan

Seluruh aktivitas operasional dan pelayanan PD. BPR Artha Praja diselenggarakan di Kantor Pusat, dan 1 (satu) Kantor Kas. Adapun tempat dan kedudukan kantor operasional dan pelayanan PD. BPR Artha Praja per 31 Desember 2021, adalah sebagai berikut :

- Kantor Pusat, beralamat di Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar
- Kantor Kas, yang baru ada 1 (satu) Kantor Kas, yaitu di Jalan Dr. Wahidin No. 105 (Masuk Lingkungan PIAIH) Kepanjenlor Kota Blitar.

3) Kepemilikan dan Permodalan Perusahaan

Kepemilikan PD. BPR Artha Praja adalah 100% adalah milik Pemerintah Kota. Modal Dasar PD. BPR Artha Praja sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar adalah sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Seluruh modal tersebut telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Blitar kepada PD. BPR Artha Praja, yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) per 31 Desember 2012.

Seiring pertumbuhan volume usaha PD. BPR Artha Praja yang terus meningkat, Pemerintah Kota Blitar mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang **ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Blitar kepada OJK dengan Nomor 900/2344/410.020.4/2016 tentang Penegasan Modal Dasar** adalah sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah). Dan berkenaan dengan itu, maka Pemerintah Kota Blitar telah melakukan :

- a. Penambahan Modal Disetor sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Keputusan Wali Kota Blitar Nomor 188/1027/HK/410.010.2/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar Tahun Anggaran 2015.
- b. Penambahan Modal Disetor sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/325/HK/410.010.2/2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar Tahun Anggaran 2016.
- c. Penambahan Modal Disetor sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/370/HK/410.010.2/2017 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Artha Praja" Kota Blitar Tahun Anggaran 2017.
- d. Penambahan Modal Disetor sebesar sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/412/HK/410.010.2/2018 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Artha Praja" Kota Blitar Tahun Anggaran 2018,

Dengan penambahan modal tersebut, maka jumlah modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Blitar kepada PD. BPR Artha Praja sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah).

4) Pengurus Perusahaan

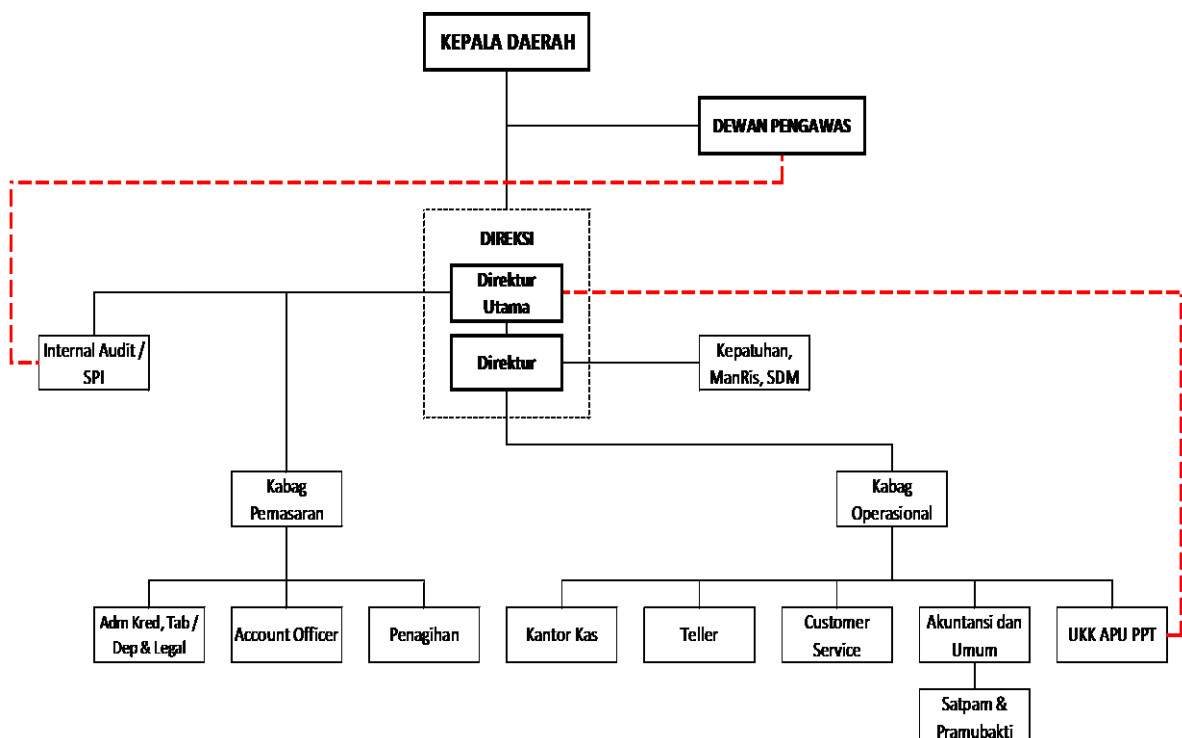
Pengurus Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi. Adapun susunan pengurus periode 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

DEWAN PENGAWAS :			
1.	Ketua	:	--
			--
2.	Anggota	:	Dite Mahargono
			Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/483/HK/410.010.2/2018 tentang Pengangkatan Saudara Dite Mahargono sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja, dengan masa bakti mulai 1 Maret 2019 sampai dengan 1 Maret 2022.
DIREKSI :			
1.	Direktur Utama	:	Elya Dwi Admoko
			Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/185/HK/410.010.2/2019 tentang Pengangkatan Saudara Elya Dwi Admoko sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja, dengan masa bakti mulai 31 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2023.
2.	Direktur	:	--
			--

Adapun profil lengkap dari pengurus perusahaan, akan diuraikan pada bagian lain dalam laporan ini.

5) Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi PD. BPR Artha Praja per 31 Desember 2021 adalah tetap didasarkan pada Keputusan Direksi PD. BPR Artha Praja Nomor : 800/003.VI.1a.III/410.400.2/2017 tentang Susunan Organisasi PD. BPR Artha Praja tanggal 31 Maret 2017 yang memuat beberapa perubahan dan penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan dinamika internal dan eksternal. Selengkapnya disajikan pada skema diagram di bawah ini.




6) Susunan Pengurus dan Manajemen

Susunan pengurus dan manajemen PD. BPR Artha Praja per 31 Desember 2021, adalah sebagai berikut.

Jabatan	Personal
---------	----------

Dewan Pengawas	
Ketua	-
Anggota	Dite Mahargono

Profile Dewan Pengawas :		
	----, <i>Ketua</i>	



	Dite Mahargono, Anggota	
	Tempat/Tanggal Lahir	Surabaya, 26 Februari 1956
	Jenis Kelamin	Laki – Laki
	Agama	Islam
	Warga Negara	Indonesia
	Status Pernikahan	Menikah
	Alamat	Jl. Bunga Renggali No. 4 Malang
	Pendidikan	S-1 Ekonomi Manajemen Universitas Merdeka Malang
	Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kasir / PE di seksi kas KBI Malang 1976 – 1984 ▪ PE / PTU di seksi perbankan, akunting dan kliring KBI Malang 1984 -1991. ▪ Pengawas Bank Yunior KBI Dili 1991-1995 ▪ Pengawas Bank Yunior KBI Jember 1995-1998 ▪ Pengawas Bank Yunior KBI Denpasar 1998-2003 ▪ Pengawas Bank (Kepala Seksi) pada seksi pengawasan dan pembinaan bank serta backup Kasi SDM, Kasi Moneter, dan Kasi Kas KBI Tasikmalaya 2003-2005. ▪ Pengawas Bank Muda Senior KBI Surabaya 2005-2010. ▪ Deputi Pimpinan Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern KBI Malang mulai 2010 s/d pensiun

Direksi	
Direktur Utama	Elya Dwi Admoko
Direktur	---

Profile Direksi

	Elya Dwi Admoko, Direktur Utama	
	Tempat/Tanggal Lahir	Jombang, 13 Mei 1961
	Jenis Kelamin	Laki – Laki
	Agama	Kristen
	Warga Negara	Indonesia
	Status Pernikahan	Menikah
	Alamat	Jl. Raya Meri RT. 002 RW. 002 No. 174, Meri, Kranggan, Mojokerto.
	Pendidikan	S-2 Manajemen Keuangan Universitas Gajayana Malang
	Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dosen Fakultas Adminstrasi Niaga dan Fakultas Ekonomi di Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto 1998-2011 ▪ Dosen Fakultas Ilmu Adminstrasi di Universitas Kadiri Kediri 1991-1993 ▪ Kabag Kredit PT. BPR Artha Swasembada Mojosari 1991-2003. ▪ Tim Tutor di Yapindo Jatim 2000-2015 ▪ Sekretaris Yapindo Jatim 2006-2015.
	---, Direktur	
Tempat/Tanggal Lahir	--	
Jenis Kelamin	--	
Agama	--	
Warga Negara	--	
Status Pernikahan	--	
Alamat	--	
Pendidikan	--	
Pengalaman Kerja	--	

Pejabat Eksekutif	
Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Moh. Khairudin Nasution
Satuan Pengendalian Internal	Achmat Gofur Budiarto
Kepala Bagian Operasional	Rubingatin
Kepala Bagian Pemasaran	Amalia Purwanda

Profile Pejabat Eksekutif		
	Moh. Khairudin Nasution, Kepatuhan & Manajemen Risiko	
	Tempat/Tanggal Lahir	Surabaya, 21 Mei 1969
	Jenis Kelamin	Laki – Laki
	Agama	Islam
	Warga Negara	Indonesia
	Status Pernikahan	Menikah
	Alamat	Jl. Pisang No. 78 Kota Mojokerto.
	Pendidikan	S-1 Hukum Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto
	Pengalaman Kerja	<p>PD. BPR. ARTHA PRAJA Kota Blitar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2016 - 2017 sebagai S.P.I. <p>PT. BPR. INTI DANITA Krian Sidoarjo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2011 - 2016 sebagai Direksi ▪ 1997 - 2011 sebagai Kepala Bagian Operasional. ▪ 1995 - 1997 sebagai Kabag Kredit. <p>PT. BPR. ARTA SWASEMBADA Mojokerto</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1993 - 1995 sebagai Admin dan Kredit Staff. ▪ 1991 - 1992 sebagai Tabungan dan Deposito Staff. <p>PT. IDEAS KONTRUKSINDO Jakarta 1989 sebagai Accounting.</p>
		Achmat Gofur Budiarto, Satuan Pengendalian Internal
Tempat/Tanggal Lahir		Tulungagung, 03 April 1979
Jenis Kelamin		Laki – Laki
Agama		Islam
Warga Negara		Indonesia
Status Pernikahan		Menikah
Alamat		Ds. Pojok RT. 015 RT. 005, Ngantru, Tulungagung.
Pendidikan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ D III - Politeknik Brawijaya Malang Akuntansi ▪ S-1 Manajemen Universitas Islam Balitar
Pengalaman Kerja		<p>LBB Piramida Tulungagung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2001 sebagai Staff Administrasi Keuangan

		<p>PT. Adira Dinamika Multi Finance.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2002-2003 sebagai Finance Staff Cabang Diponegoro Surabaya. ▪ 2003-2006 sebagai Accounting Staff Cabang Blitar ▪ 2007 sebagai Adm Head Cabang Trenggalek <p>PT. Bank BTPN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2009-2017 sebagai AQAM area Blitar.
	Rubingatin, Kepala Bagian Operasional	
	Tempat/Tanggal Lahir	Blitar, 18 Juni 1983
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Agama	Islam
	Warga Negara	Indonesia
	Status Pernikahan	Menikah
	Alamat	Jalan Bali No. 223 RT. 002/RW. 003 Karangtengah, Sananwetan, Kota Blitar.
	Pendidikan	S-1 Akuntansi Stieken Blitar
	Pengalaman Kerja	<p>PD. BPR. ARTHA PRAJA Kota Blitar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012-sekarang sebagai Kabag Ops. ▪ 2010-2012 karyawan tetap dengan staff akuntansi dan umum. ▪ 2007-2010 calon karyawan dengan jabatan admin kredit, tabungan dan deposito.
		Amalia Purwanda, Kepala Bagian Pemasaran
Tempat/Tanggal Lahir		Blitar, 09 November 1983
Jenis Kelamin		Perempuan
Agama		Islam
Warga Negara		Indonesia
Status Pernikahan		Menikah
Alamat		Jalan. Imam Bonjol GG. II No. 12 RT. 001 RW.004 Sananwetan Kota Blitar
Pendidikan		S-1 Akuntansi STIE Malang Kucecwara
Pengalaman Kerja		<p>PD. BPR. ARTHA PRAJA Kota Blitar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2015-sekarang sebagai Kepala Bagian Pemasaran. ▪ 2012-2015 sebagai SPI. ▪ 2010-2012 karyawan tetap dengan jabatan Kabag Ops. ▪ 2007-2010 calon karyawan dengan jabatan Kabag Ops.

LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA

1) Perkembangan Usaha

Laporan perkembangan usaha sebagaimana diuraikan dalam bab ini, adalah menyajikan pencapaian kinerja keuangan yang mencakup pendapatan operasional dan non operasional, beban operasional dan non operasional, serta laba usaha sebelum dan sesudah pajak. Adapun perkembangan usaha PD. BPR Artha Praja Kota Blitar per 31 Desember 2021 selengkapnya disajikan sebagai berikut.

a. Pendapatan

- **Bunga Kontraktual**
Pendapatan bunga kontraktual, yang meliputi pendapatan bunga dari pihak ketiga bank berupa Tabungan dan Deposito pada Bank Lain, serta Pendapatan Bunga Kredit Yang Diberikan dari pihak III bukan bank per 31 Desember 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp133,246,182 atau sebesar 7,14% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp 1,865,719,567 menjadi Rp 1,998,965,748 pada akhir 2021.
- **Amortisasi Provisi & Administrasi**
Pendapatan Provisi dan Administrasi per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp13.784.552 atau sebesar -11.42% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp120,724,156 menjadi Rp 106,939,604 pada akhir 2021.
- **Pendapatan Operasional Lainnya**
Terdiri dari administrasi pembukaan rekening tabungan dan deposito, denda keterlambatan angsuran pinjaman, denda pencairan deposito sebelum habis masa kontraknya, koreksi PPAP, dan penerimaan pinjaman yang telah dihapus serta lainnya per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 327,807,650 atau sebesar 150.71% dari sebesar Rp 217,508,637 pada akhir 2020 menjadi sebesar Rp545,316,287 pada akhir 2021.
- **Pendapatan Non Operasional**
Pendapatan Non Operasional per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp20,343,887 atau sebesar -36.29% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp 56,066,394 menjadi Rp 35,722,506 pada akhir 2021.

b. Beban Operasional

- **Beban Bunga**
Beban Bunga yang meliputi tabungan, deposito, beban bunga lainnya, koreksi pendapatan bunga serta amortisasi biaya transaksi per 31 Desember 2021

mengalami penurunan sebesar Rp21,349,085 atau sebesar -4.32% dari periode tahun 2020 sebesar Rp494,151,079 menjadi sebesar Rp472,801,993 pada akhir 2021.

- **Beban Penyisihan Kerugian / Penyusutan**
Beban Penyisihan Kerugian / Penyusutan yang meliputi penyisihan kerugian Penempatan Pada Bank Lain, penyisihan kerugian Kredit, Penyusutan peralatan elektronik dan kantor, Penyusutan kendaraan, Amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp320,415,360 atau sebesar -414.28% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp77,342,831 menjadi sebesar Rp397,758,191 pada akhir 2021.
- **Beban Pemasaran**
Beban Pemasaran per 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan apapun dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp0,00 menjadi Rp0,00 pada akhir 2021.
- **Beban Administrasi dan Umum**
Beban Administrasi dan Umum yang terdiri dari Beban Umum dan Administrasi yang meliputi: Premi asuransi, Sewa, Pajak-Pajak (kecuali PPh), Pemeliharaan dan perbaikan (gedung, investasi), Barang dan Jasa (ATK, telepon, listrik, air dll.) per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp22,247,355 atau sebesar -7.99% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp278,399,021 menjadi Rp256,151,666 pada akhir 2021.
- **Beban Tenaga Kerja**
Beban Tenaga Kerja mengalami peningkatan sebesar Rp61,577,038 atau sebesar 7.22% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp852,341,766 menjadi Rp913,918,804 pada akhir 2021.
- **Beban Pendidikan**
Beban Pendidikan mengalami penurunan sebesar Rp 19,357,500 atau sebesar 60.49% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp32,000,000 menjadi Rp12,642,500 pada akhir 2021.
- **Beban Operasional Lainnya**
Beban Operasional Lain terdiri dari Beban Representasi, Adm. Bank, Kontribusi Kantor Kas, Biaya kerugian Indikasi Penggelapan Teller, Biaya Adm. Kredit Fintech, Biaya Lainnya. Beban Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp327,807,650 atau sebesar 150.71% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp217,508,637 menjadi Rp 545,316,287 pada akhir 2021.
- **Beban Non Operasional**
Beban Non Operasional per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp404,605 atau sebesar 0.65% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp62,693,897 menjadi sebesar Rp63,098,502 pada akhir 2021.

c. **Laba Sebelum Pajak**

Laba Sebelum Pajak per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1,123,172,685 atau sebesar 195.36% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar (Rp574,922,987) menjadi sebesar Rp 548,249,698 pada akhir 2021.

d. **Taksiran Pajak Penghasilan**

Taksiran Pajak Penghasilan per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp11,300,094 atau sebesar 100.00% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar

Rp11,300,094 menjadi Rp0,00 pada akhir 2021. Penurunan ini (THP tampak Rp0,00) terjadi karena Laba Tahun Berjalan 2021 sebesar Rp 548,249,698 apabila diakumulasikan dengan Rugi Tahun 2020 sebesar Rp586,223,081, hasilnya masih menunjukkan kerugian sebesar Rp37,973,382 di tahun 2021.

e. Laba Bersih

Laba Bersih (Laba Setelah Dipotong Pajak) per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1,134,472,778 atau sebesar -193.52% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar (Rp586,223,081) menjadi sebesar Rp548,249,698 pada akhir 2021.

Perkembangan Usaha Bank Artha tahun 2021 - 2020, dan 3 (tiga) tahun ke belakang.

(Rp. 1.000)

LAPORAN LABA RUGI dalam ribuan rupiah	GROWTH 2021-2020	2021	2020	2019	2018	2017
Pendapatan Bunga	6.01%	2,105,905	1,986,444	2,257,606	2,660,065	2,650,058
Beban Bunga	-4.32%	472,802	494,151	538,167	631,592	615,098
Pendapatan Operasional Lainnya	150.71%	545,316	217,509	214,592	104,164	119,956
Beban Operasional	-29.64%	1,602,794	2,278,097	1,403,724	1,271,826	1,290,964
Pendapatan Non Operasional	-36.28%	35,723	56,066	32,055	50,081	19,017
Beban Non Operasional	0.64%	63,098	62,694	105,198	101,862	144,025
Laba Sebelum Pajak	-195.36%	548,250	(574,923)	457,164	809,030	738,944
Taksiran PPh	-100.00%	0	11,300	12,521	20,453	27,890
Laba Neto	-193.52%	548,250	(586,223)	444,643	788,577	711,054

2) Rasio - Rasio Keuangan

Rasio - Rasio Keuangan PD. BPR Artha Praja pada akhir tahun 2021 secara ringkas disajikan dalam tabel di bawah ini, dengan pembandingnya pada posisi tahun 2020 dan 3 (tiga) tahun ke belakang.

Rasio Keuangan (dalam %)	2021	2020	2019	2018	2017
Kredit Bermasalah / Non Performing Loan (NPL)	7.60	12.18	11.83	8.96	10.88
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) / CAR	70.12	114.04	107.64	98.71	89.10
Loan to Deposit Ratio (LDR)	58.24	33.08	37.50	35.16	40.93
Imbal Hasil Aset / Return On Asset (ROA)	2.40	(2.68)	2.26	4.01	4.13
Kualitas Aset Produktif (KAP)	3.50	3.82	3.86	2.79	3.38
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	78.29	125.79	78.55	68.86	68.81
Cash Ratio (CR)	40.49	69.07	57.80	37.29	33.31

3) Penjelasan Mengenai NPL dan Penyebab Utama NPL

Perbandingan antara jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan terlihat semakin menurun, mengingat pada kesempatan ini PD. BPR Artha Praja telah berhasil dalam menjaga rasio kredit bermasalah. Keberhasilan tersebut terjadi karena tercapainya target penyaluran kredit yang telah ditetapkan, dan upaya penyelesaian kredit bermasalah yang telah dilakukan. Karenanya pada akhir Desember 2021, jumlah NPL menurun sebesar 4.58 atau sebesar -37.60% jika dibandingkan posisi tahun 2020, yaitu dari sebesar 12.18 menjadi

sebesar 7.60 pada akhir tahun 2021. Kendati demikian perusahaan akan tetap berupaya menerapkan disiplin *early alert* yang ketat, strategi portofolio yang lebih komprehensif dan berbasis risiko, identifikasi segmen bisnis bermasalah yang lebih memadai dan fokus pada upaya penagihan untuk memperoleh pembayaran dari kredit bermasalah (NPL), serta akan diupayakan untuk fokus dalam melakukan penjualan agunan kredit bermasalah lewat lelang hak tanggungan di KPKNL Malang maupun penjualan secara sukarela (tanpa melalui lelang / lewat penyerahan secara sukarela).

4) Perkembangan Personalia

Sampai dengan posisi 31 Desember 2019, jumlah SDM di PD BPR Artha Praja berjumlah 16 orang (termasuk Direksi dan Dewan Pengawas), terdiri dari 8 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Pada tahun 2020 juga telah dicoba untuk melakukan rekrutmen baru guna mengisi posisi jabatan yang kosong karena habis masa jabatan, habis kontrak kerja dan mengundurkan diri. Gambaran selengkapnya pengurus dan pegawai PD BPR Artha Praja per 31 Desember 2020 disajikan pada tabel berikut ini :

Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan, per 31 Desember 2021 (orang)

Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021
Paska Sarjana (S-3)	-	-	-
Paska Sarjana (S -2)	1	1	1
Strata (S -1)	10	10	8
Diploma (D -3)	1	1	1
SLTA	6	4	3
Total	18	16	13

Jumlah SDM berdasarkan Jabatan, per 31 Desember 2021 (orang)

Jabatan	2021
Dewan Pengawas	1
Direksi	1
Pejabat Eksekutif	2
Kepala Bagian	2
Kepala Kantor Kas	1
Admin Tabungan, Deposito dan Kredit	1
Teller	2
Penagihan & Account Officer	1
Akuntansi dan Umum	1
Customer Service	1
UKK APU & PPT	-
Satpam & Pramubakti	1
Jumlah	14

Demografi SDM berdasarkan Jenis Kelamin, per 31 Desember 2021 (orang)

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki - Laki	10	8	7
Perempuan	8	8	7
Total	18	16	14

Demografi SDM berdasarkan Umur, per 31 Desember 2021 (orang)

Umur	2019	2020	2021
20 - 30 tahun	8	7	3
31 - 35 tahun	1	1	3
36 - 40 tahun	5	4	2
41 - 45 tahun	-	-	3
46 - 50 tahun	1	1	-
51 - 55 tahun	1	1	1
55 tahun ke atas	2	2	2
Total	18	16	14

LAPORAN PENGELOLAAN USAHA

Apabila dibandingkan dengan posisi yang sama di tahun 2020, tahun 2021 adalah tahun yang menggembirakan bagi peningkatan penyaluran kredit dan pencapaian laba. Meski diluar sana terjadi persaingan yang ketat didalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit, namun berkat sinergi (kerjasama) dengan fintech, target penyaluran kredit di tahun 2021 dapat kami capai dengan baik. Selanjutnya kami terus berupaya bangkit, berbenah serta mencari berbagai solusi untuk memperkuat posisi perusahaan dalam memanfaatkan potensi pertumbuhan di masa mendatang.

1) Aktivitas Utama

Aktivitas utama yang menjadi kegiatan usaha PD. BPR Artha Praja sebagaimana diatur berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1992 dan perubahannya UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, adalah :

- a. menghimpun dana dalam bentuk:
 - (1) simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - (2) pinjaman yang diterima;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit.
- c. menempatkan dana dalam bentuk:
 - (1) giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
 - (2) deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS);
 - (3) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (4) melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing (apabila mendapatkan izin dari OJK / BI)
- d. melakukan kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR, seperti halnya :
 - (1) kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).
 - (2) penyediaan layanan *Electronic Banking*.
 - (3) layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR dan lain sebagainya

Aktivitas utama yang menjadi kegiatan usaha PD. BPR Artha Praja sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar dan perubahannya, yaitu Peraturan Daerah kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun

2004 tentang perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, menetapkan bahwa kegiatan usaha PD. BPR Artha Praja adalah :

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar dapat menjalankan kegiatan usaha secara optimal, khususnya dalam hal menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat yang berhasil dihimpun tersebut dalam bentuk kredit, PD. BPR Artha Praja memiliki beberapa produk layanan perbankan, antara lain:

- Produk layanan simpanan terdiri dari :
Untuk Deposito Berjangka: Desika 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan serta Desika Istimewa dengan bunga dibayar dimuka berupa Sepeda Motor.
Untuk Tabungan : Tabungan Tamara, Tabungan Tamara Khusus, dan Tabungan Pena.
- Produk layanan kredit terdiri dari: Kredit Musiman (Kamus), Kredit Angsuran Bulanan (Kanal), Kredit Angsuran Pegawai Negeri Sipil (Kapas), Kredit Angsuran Karyawan Artha Praja (Kakap).

A. Penghimpunan Dana

Aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan oleh PD. BPR Artha Praja, dihimpun melalui beberapa produk layanan simpanan berupa : Tabungan dan Deposito Berjangka. Per 31 Desember 2021, kinerja penghimpunan dana menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

A.1. Tabungan - Pihak Ketiga

Penghimpunan dana masyarakat melalui Tabungan per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1,192,574,285 atau sebesar 12.95% dari periode sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp 9,209,029,872 di tahun 2020 menjadi sebesar Rp10,401,604,157 pada akhir tahun 2021.

A.2. Deposito - Pihak Ketiga

Penghimpunan dana masyarakat melalui Deposito per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp182,200,000 atau sebesar -5.67% dari periode sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp3,215,000,000 di tahun 2020 menjadi sebesar Rp 3,032,800,000 pada akhir tahun 2021.

A.3. Deposito – Dari Bank / BPR Lain

Penghimpunan dana masyarakat melalui Deposito Dari Bank/BPR Lain per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp3,500,000,000 atau sebesar 100.00% dari periode sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp0,00 di tahun 2020 menjadi sebesar Rp3,500,000,000 pada akhir tahun 2021.

B. Penyaluran Dana

Selama tahun 2021, PD. BPR Artha Praja merealisasikan penyaluran kredit kepada masyarakat dengan total sebesar Rp15,254,060,000 dalam 515 rekening pinjaman. Sedangkan jumlah baki debit kredit yang diberikan (KYD) setelah diperhitungkan dengan pembayaran angsuran pokok, adalah sebesar Rp14,108,821,715. Jumlah seluruh rekening kredit sampai akhir tahun 2021 tercatat sebanyak 598 rekening (mengalami penurunan sebanyak 25 rekening atau sebesar -4.01% dari posisi 2020 sebanyak 623 rekening). Gambaran lebih lengkap tentang akvitas kegiatan usaha penyaluran dana yang telah dilakukan oleh PD. BPR Artha Praja, khususnya total *out standing* kredit dapat dilihat pada tabel yang menyajikan data pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir, tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Guna menghindarkan *idle money*, selama tahun 2021 PD. BPR Artha Praja menempatkan dananya di bank lain sebesar Rp12,998,174,845. Gambaran lebih lengkap mengenai akvitas kegiatan usaha penyaluran dana yang telah dilakukan oleh PD. BPR Artha Praja, khususnya penempatan dana pada bank lain dapat dilihat pada tabel yang menyajikan data pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

(Rp. 1.000)

NERACA	GROWTH	2021	2020	2019	2018	2017
<i>dalam ribuan rupiah</i>	2021-2020					
Penempatan Pada Bank Lain	-9.52%	12,998,175	14,365,252	12,151,516	13,733,446	12,723,846
Kredit Yang Diberikan	96.23%	14,108,822	7,189,917	7,491,424	7,076,424	7,333,578

2) Informasi Lain

Informasi lain yang dilaporkan terkait dengan akvitas pengelolaan usaha adalah pengungkapan (*disclosure*) dalam Laporan Keuangan Tahun 2021, adalah meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- Aset produktif yang telah di restrukturisasi dan informasi lain tentang aset produktif yang di restrukturisasi. Dan selama periode berjalan 2021 adalah nihil.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Berbagai produk Simpanan Tabungan yang dimiliki PD. BPR Artha Praja diharapkan mampu menjadi alternatif produk tabungan pilihan masyarakat Kota Blitar, mengingat PD. BPR Artha Praja adalah merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Blitar. Berkaitan dengan hal ini, akan lebih diupayakan lagi dalam memasarkan produk tabungan tersebut melalui jalinan kerjasama dengan dinas atau instansi yang ada.

1) Strategi

Untuk memperlancar pencapaian target sebagaimana dimaksud dalam prioritas program kerja, manajemen perusahaan mencanangkan strategi perusahaan (*corporate strategy*) yang serupa, antara lain :

- Memberi kepuasan nasabah dan masyarakat.
Evaluasi rutin atas tingkat kepuasan nasabah dilakukan melalui suatu survey. Selain itu, Bank Artha Praja akan senantiasa memosisikan dirinya sebagai *partner* dengan nasabah, baik terkait perkembangan usaha maupun perilaku nasabahnya.
- Menyelaraskan sumber daya manusia dan organisasi untuk tujuan perusahaan.
Sumber daya manusia yang ada dan dimiliki perlu diselaraskan dengan organisasi fungsional, agar dapat mengarah kepada tujuan perusahaan yang sama, sehingga dapat mewujudkan hasil optimal. Tolok ukur penyelarasan ini diantaranya adalah tingkat kepercayaan (*trust level*), tingkat kepemimpinan (*leadership*), dan efektifitas berorganisasi (*organizational effectiveness*).
- Tumbuh dengan hasil optimal, dan risiko minimal serta patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
Kinerja secara kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan tertentu. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian ini, maka atas setiap transaksi yang dilakukan dituntut agar patuh terhadap peraturan yang berlaku.
- Penerapan Standar pada TI dan Operasional.
Pengembangan infrastruktur TI dan Operational dengan standar yang berlaku sehingga dapat memberikan kontribusi pertumbuhan perusahaan secara berkesinambungan.

2) Kebijakan Perusahaan

Secara garis besar, beberapa kebijakan perusahaan yang telah dilaksanakan manajemen PD. BPR Artha Praja selama tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas kinerja perusahaan
Beberapa kebijakan yang telah dilakukan untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja perusahaan, antara lain :
 - Penunjukan Kantor Akuntan Publik Moh. Wildan & Adi Darmawan untuk melakukan audit laporan keuangan.

- Menunjuk pejabat intern untuk melakukan audit intern secara berkala, dan audit TI secara periode tertentu (paling sedikit satu kali dalam satu tahun)
 - Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan penilaian Kantor Otoritas Jasa Keuangan.
 - Senantiasa melakukan evaluasi dan penyesuaian tingkat suku bunga kredit dan simpanan, baik terhadap ketentuan / regulasi yang berlaku maupun terhadap dinamika yang berkembang.
- b. Peningkatan kualitas SDM.
- PD. BPR Artha Praja memiliki program pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang diorientasikan pada pembentukan SDM yang handal, profesional, berkualitas, mempunyai motivasi dan kinerja yang tinggi serta terbina iman dan taqwanya. Beberapa program yang telah dilaksanakan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia tersebut antara lain :
- Program Pendidikan dan Pelatihan
PD. BPR Artha Praja telah merealisasikan berbagai program kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan secara mandiri oleh perusahaan maupun dalam bentuk partisipasi pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga atau asosiasi lain.
 - Kegiatan Kerohanian
Dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan seluruh pegawai perusahaan, secara berkala dihimbau untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan rohani dan doa bersama yang tengah diadakan.
- c. Kegiatan Promosi
- Berbagai kegiatan promosi yang telah dilaksanakan sepanjang 2021, antara lain:
- Promosi pada media massa
 - Mengembangkan pusat informasi perusahaan melalui fasilitas *website*
 - Siaran iklan melalui radio lokal
 - Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
 - Pembuatan banner, Kalender, Payung, *Leaflet*, Mug, Baliho, Spot Iklan, ballpoint, dan sebagainya.
- d. Kegiatan Literasi dan Edukasi dan Inklusi
1. Kegiatan Literasi Edukasi dan Inklusi BPR Artha Praja Kepada PNS Kota Blitar.
Meningat situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, kami sengaja meniadakan kegiatan ini. Namun di kesempatan selanjutnya apabila situasinya memungkinkan, maka kegiatan edukasi akan dilakukan dalam bentuk workshop dengan tema perencanaan keuangan yang tepat dengan memanfaatkan produk perbankan. Dalam kegiatan ini BPR Artha Praja akan bertindak sebagai salah satu narasumber yang memberikan penjelasan langsung tentang keberadaan, fungsi, dan peran BPR selama ini dalam turut serta membangun ekonomi Kota Blitar. Disamping itu juga memberikan wawasan mengenai pentingnya perencanaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari untuk masa depan dengan memanfaatkan produk BPR.
 2. Kegiatan Grebeg Pasar
Meningat situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, kami sengaja meniadakan kegiatan ini. Namun pada kesempatan selanjutnya apabila situasinya memungkinkan, kegiatan grebeg pasar ini akan kembali dilangsungkan secara bergantian dan terjadwal dari satu pasar ke pasar lain di Kota Blitar. Dalam kegiatan grebeg pasar tersebut, literasi edukasi perbankan akan dilakukan dalam bentuk sosialisasi langsung kepada para penjual dan pembeli yang berada di pasar tersebut.

Adapun strategi yang bakal dilakukan, adalah dengan cara membagikan brosur dan memasang spanduk tentang edukasi perbankan serta menyediakan forum tanya jawab.

3. Kegiatan Workshop dan Motivasi Pengenalan Keuangan dengan Jasa Layanan BPR. Mengingat situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, kami sengaja meniadakan kegiatan ini. Namun pada kesempatan selanjutnya apabila situasinya memungkinkan, kegiatan ini akan dilaksanakan kembali dalam bentuk workshop sekaligus motivasi, dimana BPR Artha Praja akan bekerjasama dengan pihak PERBARINDO Korsek Blitar. Adapun sasarannya adalah nasabah BPR baik tabungan, kredit maupun deposito. Dengan kegiatan ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan pemahaman nasabah tentang produk BPR sehingga mampu meningkatkan literasi keuangan mereka. Selain itu juga dengan motivasi diharapkan dapat menambah keyakinan tentang keunggulan produk BPR
4. Kegiatan Edukasi Perbankan lewat kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Blitar yaitu Kenduri Rakyat, Pawai Budaya, dan Bazaar Blitar Djadoel, Pawai Kebangsaan HUT RI. Mengingat situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, kami sengaja meniadakan kegiatan ini. Namun pada kesempatan selanjutnya apabila situasinya memungkinkan, maka kegiatan ini akan kembali dilakukan. Adapun hal-hal yang perlu disiapkan dalam kegiatan ini, adalah :
 - properti tulisan-tulisan tentang edukasi perbankan sebagai media untuk memperkenalkan perbankan secara umum, maupun BPR secara khusus kepada pengunjung. Seperti halnya tulisan-tulisan atau alat peraga tentang edukasi perbankan atau himbauan yang harus dibawa setiap pengunjung stand yang berfoto selfie di stand kami. Harapannya, adalah orang menjadi tergerak hatinya manakala melihat pesan-pesan yang disampaikan dalam foto tersebut.
 - pajangan repro uang Indonesia jaman dulu khususnya yang bergambar Soekarno dengan judul “Bung Karno dalam mata uang”. Edukasi ini dimaksudkan dengan tujuan agar masyarakat lebih cinta terhadap rupiah, mau merawat rupiah dan menghargai rupiah dengan baik.
 - penukaran uang baru. Kegiatan ini sebagai bentuk edukasi perbankan PD. BPR Artha Praja kepada masyarakat umum mengenai pengenalan uang baru dan ciri keasliannya.
5. Kegiatan Edukasi Perbankan melalui kegaitan-kegiatan Sosial PD. BPR Artha Praja seperti :
 - Sembako Murah .

Dalam situasi yang masih dalam pandemi Covid-19 ini, di tahun 2021 kami mencoba menghentikan kegiatan ini. Namun di kesempatan selanjutnya, akan kami coba untuk melaksanakan kembali kegiatan ini, mengingat dalam kegiatan ini PD. BPR Artha Praja juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat yang diundang. Adapun strategi yang dilakukan, antara lain dengan cara memasang spanduk, dan membagikan brosur mengenai produk BPR serta manfaatnya dalam kehidupan sekarang maupun masa depan.
6. Kegiatan edukasi perbankan sejak dini untuk siswa PAUD dan SD
Mengingat situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, kami sengaja meniadakan kegiatan ini. Namun pada kesempatan selanjutnya apabila situasinya memungkinkan, kegiatan ini akan kembali kami lanjutkan. Adapun strategi yang bakal dilakukan oleh PD. BPR Artha Praja adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak sekolah untuk melakukan sosialiasasi langsung kepada orang tua / wali murid dan siswa mengenai pentingnya kegiatan menabung sejak dini.

3) Pengembangan Potensi dan Sumber Daya Perusahaan

a. Pengembangan Teknologi Informasi

PD. BPR Artha Praja Kota Blitar telah menggunakan perangkat teknologi informasi berbasis komputer yang terkoneksi secara *on line* antara kantor pusat dengan kantor kas maupun kantor cabang (jika ada). Sebagai instrument yang sangat strategis dalam menunjang operasional bank, pengembangan sistem teknologi informasi ini senantiasa mendapatkan prioritas utama. Berbagai perangkat teknologi informasi yang telah digunakan untuk mendukung kegiatan operasional PD. BPR Artha Praja, antara lain : komputer dengan jaringan internet, *website*, mesin faksimili, LCD viewer, telepon, dan mesin hitung uang.

Sistem Operasional :

Untuk mewujudkan kesungguhan perusahaan dalam melakukan pembenahan sistem ke arah yang lebih aman guna memperlancar sistem operasional, serta menuju sistem informasi manajemen, pihak BPR berupaya menjalin kerjasama dengan PT. MARSTECH GLOBAL. Bersama dengan vendor ini, pihak BPR akan melakukan berbagai upaya pembenahan penyelesaian modul CBS, seperti halnya LBBPR, Laporan Harian / Laporan Berkala - SAK ETAP terbaru, dan Laporan SLIK OJK, PPAP dan TKS terbaru.

Sistem Keamanan :

Sistem keamanan yang dipakai pada MARS adalah dengan memakai sistem password yang berbeda pada masing-masing divisi, dan di tiap divisi ada *password user* dan *password admin* yang ditata usahakan dengan seksama. Untuk setiap transaksi tertentu, misalkan dalam pengambilan tabungan pada limit tertentu, setoran tabungan pada limit tertentu, penempatan deposito, pelunasan deposito, pengambilan titipan pada limit tertentu, realisasi kredit dan pelunasan kredit, diberlakukan adanya otorisasi dari pejabat yang berwenang/direksi. Sebagai pengaman tambahan, vendor MARS membuat rekaman/catatan segala kegiatan (*log book*) pada masing-masing unit komputer, baik di *server* maupun di *client*.

Kendati demikian, tidak tertutup kemungkinan masih terdapatnya kelemahan dalam Teknologi Informasi yang digunakan BPR. Karenanya, secara berkesinambungan sistem keamanan dan pengamanan CBS akan senantiasa ditingkatkan, sehingga potensi kerugian akibat penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan CBS dapat di minimalisir.

Penyedia Jasa Teknologi Informasi :

Untuk Core Banking System, perusahaan bekerjasama dengan PT. MARSTECH GLOBAL yang beralamatkan di Jl. Bulu Mas II Bo. 1, Kanigoro, Kartohajo, Madiun. Sedangkan untuk pembuatan website www.bankarthapraja.com, perusahaan bekerjasama dengan Digital Branded, yang beralamatkan di Dsn. Karanganyar, Ds. Gembongan, Kec. Ponggok, Blitar 66153.

b. Perkembangan dan Target Pasar

Sejalan dinamika perubahan yang senantiasa bergulir dengan ritme yang cepat, tanpa mengenal batas, ruang dan waktu, serta iklim persaingan yang semakin terbuka dan kompleks akibat semakin bertambahnya jumlah kompetitor, perusahaan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dan menumbuhkan daya saing yang tinggi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang ada. Hal ini dapat terbukti bila segenap elemen SDM yang ada bahu membahu dalam berupaya dan/atau mengupayakan cara baru dengan fokus pada fondasi perbankan, jaringan, produk dan layanan, serta nasabah guna memastikan BPR Artha Praja dapat beroperasi dengan efektif efisien dalam memberikan nilai tambah secara berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

URAIAN	2019	2020	2021			
			Rencana Bisnis	Realiasi Pencapaian	Pertumbuhan	
					Nominal	%
ASET						
Kas	101,974	216,295	341,920	159,110	(57,185)	-26.44%
Kas Dalam Valuta Asing	-	-	-	-	-	0.00%
Surat Berharga	-	-	-	-	-	0.00%
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	76,489	64,178	77,045	95,150	30,972	48.26%
Penempatan Pada Bank Lain	12,155,302	14,368,843	12,391,897	13,001,601	(1,367,242)	-9.52%
Penyisihan Kerugian -/-	60,758	-	61,941	-	-	0.00%
Jumlah	12,094,544	14,368,843	12,329,956	13,001,601	(1,367,242)	-9.52%
Kredit Yang Diberikan	7,334,456	7,005,433	9,039,977	13,920,638	6,915,205	98.71%
PPAP (-/-)	91,046	90,509	85,942	335,558	245,049	270.75%
Jumlah	7,243,410	6,914,924	8,954,035	13,585,080	6,670,156	96.46%
Agunan Yang Diambil Alih	-	73,795	-	73,795	-	100.00%
Aktiva Tetap dan Inventaris						
a. Tanah & Gedung	-	-	-	-	-	0.00%
b. Ak Peny & Penurunan Nilai Gedung -/-	-	-	-	-	-	0.00%
c. Inventaris	465,918	500,977	991,477	502,857	1,880	0.38%
b. Ak Peny & Penurunan Nilai Inv -/-	393,901	435,855	561,350	460,569	24,714	5.67%
Jumlah Asset Tetap dan Inventaris	72,017	65,122	430,127	42,288	(22,834)	-35.06%
Aset Tidak Berwujud	123,705	136,705	236,705	136,705	-	0.00%
Akumulasi Amortisasi -/-	115,690	120,685	120,678	127,006	6,321	5.24%
Asset Lain – Lain	1,212,206	405,458	371,173	206,214	(199,244)	-49.14%
JUMLAH ASET	20,808,655	22,124,635	22,620,283	27,172,937	5,048,302	22.82%
KEWAJIBAN						
Kewajiban segera dapat dibayar	481,220	541,276	647,714	571,759	30,483	5.63%
Utang Bunga	10,767	11,659	41,276	10,294	(1,365)	-11.71%
Utang Pajak	-	-	-	-	-	0.00%
Simpanan						
a. Tabungan	7,329,059	9,209,030	7,598,196	10,401,604	1,192,574	12.95%
b. Deposito Berjangka	2,952,000	3,215,000	2,743,995	3,032,800	(182,200)	-5.67%
Jumlah Simpanan	10,281,059	12,424,030	10,342,191	13,434,404	1,010,374	8.13%
Simpanan dari Bank Lain	-	-	-	3,500,000	3,500,000	#DIV/0!
Pinjaman Diterima	-	-	-	-	-	0.00%
Dana Setoran Modal - Kewajiban	-	-	-	-	-	0.00%
Kewajiban Imbalan Kerja	-	-	-	-	-	0.00%
Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-	0.00%
Modal Pinjaman	-	-	-	-	-	0.00%
Kewajiban Lain - Lain	119,440	128,973	202,015	89,533	(39,440)	-30.58%
JUMLAH KEWAJIBAN	10,892,486	13,105,938	11,233,196	17,605,990	4,500,052	34.34%
EKUITAS						
Modal :						
Modal dasar	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	-	0.00%
Modal yang belum disetor -/-	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	0.00%
Tambahan Modal Disetor (Agió Saham)	-	-	-	-	-	0.00%
Modal Sumbangan	-	-	-	-	-	0.00%
Jumlah	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	0.00%
Dana Setoran Modal - Ekuitas	-	-	1,500,000	-	-	0.00%
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	-	-	-	-	-	0.00%
Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-	-	0.00%
Saldo Laba						
Cadangan Umum	735,763	802,460	782,771	802,460	-	0.00%
Cadangan Tujuan	735,763	802,460	782,771	802,460	-	0.00%
Belum Ditentukan Tujuannya	444,643	(586,223)	321,545	(37,973)	548,250	-93.52%
Total	1,916,169	1,018,697	1,887,087	1,566,947	548,250	53.82%
JUMLAH EKUITAS	9,916,169	9,018,697	11,387,087	9,566,947	548,250	6.08%
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20,808,655	22,124,635	22,620,283	27,172,937	5,048,302	22.82%

c. Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor

Jumlah	Jenis	Lokasi
1	Kantor Pusat	Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar
-	Kantor Cabang	--
1	Kantor Kas	Jalan Dr. Wahidin No. 105 (Masuk Lingkungan PIAIH) Kepanjenlor Kota Blitar.

4) Kerjasama Bank Artha Praja dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha

Pada tahun 2021 perusahaan tetap berupaya untuk lebih memantapkan jalinan kerjasama instansi-instansi / dinas yang ada di Kota Blitar dalam rangka penyaluran kredit. Agar selanjutnya kemitraan yang telah terbina dapat terjalin dengan lebih erat lagi, maka perusahaan berupaya menjalin kerjasama lebih lanjut dalam bentuk penanganan program non tunai atas honor / insentif.

Disamping itu, perusahaan juga berupaya lebih memantapkan jalinan kerjasama dengan :

- BPR milik Pemda guna kelancaran penempatan deposito antar bank apabila ada kelebihan dana yang belum sempat tersalurkan dalam bentuk kredit.
- Pihak asuransi atau penjaminan kredit agar dapat memberikan proteksi yang sesuai dengan karakteristik produk.
- Pihak Fintech guna kelancaran penyaluran dana dalam bentuk kredit, dan pengimpunan dana dalam bentuk deposito.

5) Informasi Lainnya

- a. Kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham dalam Kelompok Usaha BPR dan perubahannya dari tahun sebelumnya.

BPR Artha Praja tidak memiliki kelompok usaha BPR, dan tidak memiliki keterkaitan kelompok usaha BPR apapun.

Kepemilikan saham anggota Direksi di Kelompok Usaha BPR

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	Prosentase (%)
Elya Dwi Admoko	Direktur Utama	Tidak Ada	0 %
-	-	-	-

Kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas di Kelompok Usaha BPR

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	Prosentase (%)
Subandi	Ketua	Tidak Ada	0 %
Dite Mahargono	Anggota	-	-

- b. Keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, dan/atau antara pemegang saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas.

Sampai 2021, hubungan keuangan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR, sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan		
		Dewan Pengawas	Direksi Lainnya	Pemegang Saham
Elya Dwi Admoko	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
-	-	-	-	-

Sampai 2021, hubungan keluarga antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR, sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan		
		Dewan Pengawas	Direksi Lainnya	Pemegang Saham
Elya Dwi Admoko	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
-	-	-	-	-

Sampai 2021 hubungan keuangan antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan		
		Dewan Pengawas	Direksi	Pemegang Saham
Subandi	Ketua	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Dite Mahargono	Anggota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sampai 2021 hubungan keluarga antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan		
		Dewan Pengawas	Direksi	Pemegang Saham
Subandi	Ketua	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Dite Mahargono	Anggota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

- c. Kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas termasuk bonus, tantiem, dan fasilitas lain.

Kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas termasuk bonus, tantiem, dan fasilitas lain ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dalam Pasal 60 dan 61 (untuk anggota Direksi), Pasal 37 (untuk anggota Dewan Pengawas)

- d. Perubahan penting lain yang terjadi di Bank Artha Praja dan/atau di kelompok usahanya yang mempengaruhi operasional Bank Artha Praja dalam tahun yang bersangkutan.

Perubahan-perubahan penting lainnya yang terjadi di tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- Peningkatan perolehan laba sebesar Rp 1,134,472,778 atau sekitar -193.52% dari periode sebelumnya, yaitu dari Rugi sebesar Rp586,223,081 di tahun 2020 menjadi Laba sebesar Rp548,249,698 pada tahun 2021. Peningkatan laba ini, diantaranya disebabkan oleh keberhasilan menjual jaminan/agunan berupa tanah pekarangan yang diberikan oleh oknum pelaku fraud.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN
LAPORAN KEUANGAN

**PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHA PRAJA**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021

Nomor : 00064/3.0420/AU.2/07/0388-2/I/IV/2022
Tanggal : 19 April 2022

PD BPR ARTHA PRAJA

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	
SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
LAPORAN KEUANGAN:	
1. Neraca per 31 Desember 2021	1
2. Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021	2
3. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021	3
4. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021	4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5-24
Lampiran 1 Klasifikasi Kredit Yang Diberikan	25-26
Lampiran 2 Kualitas Aset Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	27
Lampiran 3 Aset Tertimbang Menurut Risiko	28
Lampiran 4 Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	29
Lampiran 5 Rasio Perhitungan Kesehatan Bank	30

No : 0029/MWA.02/ML/IV/2022

Malang, 05 April 2022

Pengurus dan Dewan Pengawas
PD. BPR ARTHA PRAJA
Jl. Mastrip no. 71, Kepanjen Kidul
BLITAR

MANAGEMENT LETTER

Dengan hormat,

Sehubungan dengan selesainya audit atas laporan keuangan **PD. BPR ARTHA PRAJA** (bank), untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, kami sampaikan management letter yang berisikan temuan dan saran sebagai berikut:

A. KONDISI USAHA

1. Perkembangan Kondisi Usaha

Volume usaha bank tahun 2021 dibandingkan periode 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp 5.048.156.320 atau 22,82% dari sebesar Rp 22.124.635.297 menjadi sebesar Rp 27.172.936.395. Pada sisi pasiva, terdapat peningkatan terutama pada Simpanan sebesar Rp 1.010.374.285 atau 8,13% dari sebesar Rp 12.424.029.872 menjadi sebesar Rp 13.434.404.157 Pada sisi aktiva, terdapat penurunan terutama pada penempatan pada bank lain sebesar Rp 1.367.077.458 atau 9,52% dari sebesar Rp 14.365.252.303. menjadi sebesar Rp 12.998.174.845.

2. Aktiva Produktif (AP)

a. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Aktiva produktif bank terdiri dari kredit yang diberikan sebesar Rp 14.108.821.715 dan penempatan dana pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka sebesar Rp 13.001.600.781 (sesuai Pasal 1 ayat [5] POJK Nomor 33 /POJK.03/2018). Rasio kualitas aktiva produktif, tercermin dari rasio aktiva produktif sebesar 3,50%. Sedangkan rasio Non Performing Loan (NPL) Netto sebesar 5,24%.

b. Kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Sampai dengan posisi 31 Desember 2021 bank telah membentuk PPAP sebesar Rp 335.558.525 dan PPAPWD yaitu sebesar Rp 335.558.525, sehingga rasio PPAP terhadap PPAPWD pada posisi pemeriksaan sebesar 100,00%.

c. Analisis Konsentrasi Risiko

Kredit yang diberikan dijamin dengan tabungan dan deposito yang diblokir, tanah, bangunan, kendaraan mobil atau sepeda motor dan telah diikat dengan hak tanggungan, kuasa menjual atau fidusia dan secara di bawah tangan.

3. Rentabilitas

Perkembangan hasil usaha bank pada akhir tahun 2021 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini terlihat dari laba bersih sebelum pajak tahun 2021 sebesar Rp 548.249.698 yang meningkat sebesar Rp 1.123.172.685 atau 195,36% dari rugi tahun 2020 sebesar Rp 574.922.987. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pendapatan bunga sebesar Rp 119.461.630 atau 6,01% dari tahun 2020 sebesar Rp 1.986.443.723 menjadi sebesar Rp 2.105.905.352 di tahun 2021.

4. Permodalan

Berdasarkan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), jumlah modal BPR per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 9.292.821.040. Jumlah tersebut telah melebihi ketentuan Modal Minimum BPR sebesar Rp. 1.590.409.058 (12% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko [ATMR] BPR), sehingga rasio permodalan (CAR) yaitu rasio perbandingan antara modal terhadap ATMR tercatat sebesar 70,12%.

5. Likuiditas

a. Perkembangan Keadaan dan Kecukupan Likuiditas

Cash ratio posisi pemeriksaan sebesar 40,49%. Jumlah alat likuid pada posisi pemeriksaan adalah sebesar Rp 6.480.711.180 yang terdiri dari kas sebesar Rp 159.110.400, giro pada bank lain sebesar Rp 3.425.936, dan Penempatan pada bank lain berupa tabungan sebesar Rp 6.318.174.844. Sementara hutang lancar sebesar Rp. 16.006.163.636 yang terdiri dari kewajiban segera Rp 571.759.480, tabungan masyarakat Rp. 10.401.604.156, deposito masyarakat Rp. 3.032.800.000 dan simpanan bank lain sebesar Rp 2.000.000.000.

b. Analisis Pengelolaan Risiko Likuiditas

Cash ratio pada tanggal pemeriksaan sebesar 40,49%. Untuk menjaga kecukupan tingkat likuiditas, bank menempatkan dana pada bank lain dalam bentuk tabungan secara keseluruhan sebesar Rp 6.318.174.844 dan deposito sebesar Rp 6.680.000.000.

B. TEMUAN DAN REKOMENDASI

1. Non Performing Loan (NPL) Bruto pada posisi pemeriksaan sebesar **7,60%** dan tergolong tinggi dimana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa NPL maksimal sebesar 5%.

Saran:

Sebaiknya bank membuat action plan yang digunakan sebagai acuan penyelesaian kredit bermasalah dan benar-benar aplikatif sehingga nilai manfaat bisa optimal

Tanggapan BPR:

Setuju, selanjutnya BPR akan lebih mengoptimalkan penagihan secara terjadwal maupun mengupayakan penyelesaian debitur NPL dengan pendekatan eksekusi jaminan.

2. Loan To Deposit Ratio (LDR) pada posisi pemeriksaan sebesar **58,24%** dan tergolong rendah mengindikasikan kemerosotan distribusi jumlah kredit. Selain itu, mencerminkan bahwa fungsi intermediasi bank belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Saran:

Sebaiknya bank lebih memperhatikan intermediasi bank dimana pelemparan kredit belum berjalan dengan baik sehingga diperlukan strategi khusus untuk melakukan ekspansi kredit tanpa mengesampingkan Inherent Risk (Risiko Bawaan) terhadap risiko kredit yang mungkin akan timbul. Selain itu diperlukan evaluasi produk kredit BPR dibandingkan dengan para kompetitor sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki dan mendapat perhatian.

Tanggapan BPR:

Setuju, BPR telah mengambil langkah dalam upaya peningkatan pelemparan kredit, salah satunya BPR bekerjasama dengan pihak Fintech. Disamping itu BPR juga tetap fokus untuk pelemparan kredit kepada UKM, PNS kota Blitar. Untuk saat ini BPR juga sedang proses konsolidasi dengan dinas-dinas terkait di kota Blitar untuk kredit tenaga kerja honorer/kontrak di lingkungan kota Blitar.

3. Jumlah anggota direksi PD BPR Artha Praja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah berjumlah 1 orang, yaitu direktur utama.

Saran:

Seharusnya PD. BPR ARTHA PRAJA segera menunjuk 1 orang direksi tambahan yang berkompeten sehingga pengelolaan BPR bisa dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut sesuai dengan pasal 27 ayat 1 POJK No. 3/POJK.03/2016 yang mewajibkan jumlah anggota direksi BPR minimal 2 orang.

Tanggapan BPR:

Dalam rapat pertemuan dengan pemerintah kota blitar pada Maret 2022, telah disepakati untuk segera dilakukan pengisian posisi kosong direksi serta komisaris. Untuk merealisasikan hal tersebut, langkah awal yang disepakati berupa segera dibentuknya panitia seleksi .

4. BPR belum menatausahakan pengelolaan dokumen penting bagi BPR. Dalam hal ini, BPR belum mempunyai ruangan khasanah sebagai sarana pengamanan surat berharga, jaminan, uang dan barang-barang berharga lainnya.

Saran:

Segera dibuat ruangan khusus untuk khasanah.

Tanggapan BPR:

Pembangunan ruang khusus untuk khasanah terkendala status gedung BPR yang masih sewa dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Hal ini tentu berkaitan dengan pembebanan biaya-biaya atas pembuatan ruang tersebut yang besar dan hanya dapat dibebankan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai masa sewa. Disamping itu hal lain yang menjadi pertimbangan BPR, adalah ketika terjadi pemindahan gedung sewaktu-waktu karena masa sewa yang singkat.

Atas permasalahan tersebut, BPR telah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah kota Blitar khususnya bagian BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) untuk dapat dilakukan sewa gedung dengan jangka panjang minimal 5 (lima) tahun, sehingga apabila BPR melakukan pembangunan termasuk ruang khasanah pembebanan biaya dapat diakui secara amortisasi selama minimal 5 (lima) tahun.

5. Penempatan dana Antar Bank (ABA) berupa tabungan di beberapa bank umum melebihi limit yang di jamin oleh Lembaga penjamin simpanan (LPS). Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang – undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2008 tentang besaran nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, pada tanggal 13 oktober 2008, nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua Miliar rupiah). Berikut Tabungan Antar Bank Aktiva (ABA) di beberapa bank umum yang melebihi limit yang di jamin LPS :

<i>NO</i>	<i>Nama Bank</i>	<i>Saldo</i>
1	Bank Mandiri	Rp. 2.390.206.148,-
2	Bank Negara Indonesia	Rp. 2.005.993.920,-

Saran:

Sebaiknya bank dapat mengupayakan menempatkan dana Antar Bank Aktiva (ABA) sesuai limit yang dijamin LPS. Resiko likuidasi hingga penutupan pada penempatan dana Antar Bank Aktiva (ABA) akan merugikan bank jika dana Antar Bank Aktiva (ABA) melebihi limit yang dijamin LPS

Tanggapan BPR :

- a. Sejak BPR bekerjasama dengan Fintech dalam pelemparan kredit, maka sering terjadi mutasi tabungan di Bank BNI dan Mandiri dalam jumlah yang besar untuk transaksi tersebut (realisasi maupun pelunasan yang dilakukan melalui 2 rekening BPR tersebut). Misalnya , untuk mutasi tabungan di BNI bisa dilihat saldo pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.005.993.920 (diatas penjaminan LPS) namun pada hari kerja selanjutnya (tepatnya pada 03 Januari 2022) terjadi mutasi sekitar 200 juta sehingga saldo telah berubah menjadi sekitar Rp 1,8 M (dalam rentang penjaminan LPS). Sehingga menurut kami penempatan dana di BNI khususnya masih sesuai limit.
 - b. BPR akan terus melakukan monitoring saldo Penempatan Bank Lain khususnya Tabungan
 - c. Untuk mengantisipasi kelebihan limit dana pada Penempatan Bank Lain khususnya tabungan, maka kedepannya BPR akan mempertimbangkan untuk melakukan pembukaan rekening baru di Bank umum baru
6. Berdasarkan sampling 10 depositan terbesar total Rp 1.731.900.000 atau sebesar 57% dari total keseluruhan depositan, kemudian pada sampling 10 penabung terbesar dengan total Rp 4.924.645.675 atau sebesar 47% dari total keseluruhan penabung. Hal ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga BPR terkonsentrasi kepada penabung dan depositan inti sehingga perlu menjadi perhatian BPR, hal ini dikarenakan kondisi saat ini yang berpotensi likuiditas bilamana sewaktu-waktu nasabah menarik simpanannya di BPR.

Saran :

Sebaiknya BPR meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Bank agar semakin meningkatnya penabung, depositan, dan debitur yang memberi kepercayaan dengan menggunakan produk dari bank.

Tanggapan BPR:

1. Secara umum memang depositan terbesar (pareto) BPR Artha praja merupakan depositan lama yang loyal dengan BPR (mempunyai hubungan yang baik dan kepercayaan tinggi dengan BPR). Meski demikian, untuk lebih menjaga kestabilan likuiditas, BPR telah melakukan kerjasama dengan Fintech dalam hal menghimpun dana masyarakat melalui layanan berbasis teknologi (Platform).
 2. Disamping itu, dengan melalui platform Fintech tersebut, BPR juga telah melakukan kerjasama funding melalui penempatan Deposito. Hal ini juga dimaksudkan untuk lebih menjaga kestabilan likuiditas BPR.
7. Berdasarkan pemeriksaan terhadap berkas administrasi Tabungan, terdapat daftar nasabah dengan kekurangan kelengkapan administrasi yaitu sebagai berikut:

No	Nama Penabung	No. rekening	Keterangan
1	GATOT PURWANI	10111001581	Tidak ada tanda tangan direktur pada form pembukaan tabungan

No	Nama Penabung	No. rekening	Keterangan
2	PENGELOLA TABSIS "SMPN 07 BLITAR"	10111001458	Form nasabah kosong , tidak ada tanda tangan direktur pada pembukaan tabungan
3	SRI ASTUTIK	10110000612	Tidak ada tanda tangan direktur pada form pembukaan tabungan
4	SRI ASTUTIK	10110000657	Tidak ada tanda tangan direktur pada form pembukaan tabungan
5	SULIKAH	10111001068	Tidak ada tanda tangan direktur pada form pembukaan tabungan.
6	MI PESANTREN KOTA BLITAR	10110000527	Tidak ada tanda tangan direktur pada form pembukaan tabungan
7	WAHYU TININGSIH	10110000668	Tidak ada tanda tangan direktur pada form pembukaan tabungan

Saran:

Sebaiknya bank lebih memperhatikan mengenai kelengkapan administrasi terkait tabungan, deposito, dan kredit sesuai SOP yang berlaku.

Tanggapan BPR:

Untuk selanjutnya BPR akan lebih memperhatikan kelengkapan administrasi dokumen yang ada terkait dengan penabung, depositan maupun debitur. Sedangkan untuk kekurangan dokumen akan segera dipenuhi maksimal bulan depan (31 Mei 2022).

8. Berdasarkan pemeriksaan terhadap berkas administrasi deposito, terdapat daftar depositan dengan kekurangan kelengkapan administrasi yaitu sebagai berikut :

No	Nama Deposan	No. rekening	Keterangan
1	LUSSY CHRISTINA	10120000328	• Tanda tangan Pada Pembukaan Deposito Kurang Lengkap.
2	TJAHJADI NUSANTARA	10120000299	• Tidak Ada Tanda tangan Mengetahui Dan Menyetujui Pada Formulir Pembukaan Deposito.
3	TYASING WIJI ASTUTIK	10120000324	• Tidak Ada No Rek Pada Pembukaan • Tidak Ada Ttd Mengetahui Dan Menyetujui Pada Formulir Pembukaan Deposito.

Saran:

Sebaiknya bank lebih memperhatikan mengenai kelengkapan administrasi terkait tabungan, deposito, dan kredit sesuai SOP yang berlaku.

Tanggapan BPR:

Sepakat dengan temuan, selanjutnya akan lebih memperhatikan terkait kelengkapan pada form pembukaan deposito. Kekurangan dokumen akan segera dipenuhi maksimal bulan depan (31 Mei 2022). Khusus untuk deposito atas nama Lussy Christina, adalah merupakan deposito yang didapat BPR melalui Platform Fintech Komunal, dengan kelengkapan berupa : Scan KTP, dan e-form yang berisikan Surat Kuasa dan Formulir Permohonan Pembukaan Deposito, karenanya kekurangan tanda tangan pada pembukaan, dapat digantikan dengan e_form yang ada.

9. Berdasarkan pemeriksaan terhadap berkas Kredit, terdapat perbedaan pada pencatatan sandi jenis agunan antara labul OJK dan berkas kredit dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	No. rekening	Plafond	Keterangan
1	WINARWAN	10130001552	35.000.000	• Pada labul 601 202 pada berkas 203
2	ENDANG WIKANTI	10130002001	70.000.000	• Pada labul 601 202 pada berkas 203
3	RATNAWATI	10130002030	30.000.000	• Pada labul 601 202 pada berkas 203
4	ANIS YUNARTI	10130002066	30.000.000	• Pada labul 601 202 pada berkas 203
5	SUYADI	10130002099	130.000.000	• Pada labul 601 202 pada berkas 203
6	SURYASIH	10130002106	56.000.000	• Pada labul 601 202 pada berkas 203

Saran:

Berdasarkan SEOJK No. 8 tahun 2019, agunan dengan sertifikat tanah dan diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) seharusnya di tuliskan dengan kode 203.

Tanggapan BPR:

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan antara sandi jenis agunan yang terdapat pada Core Banking Sistem (CBS) dengan sandi jenis agunan pada LBBPR (Update yang dilakukan oleh Vendor masih belum sempurna). Selanjutnya atas kesalahan tersebut, segera dilakukan koordinasi dengan pihak vendor untuk menyamakan / membenahi perbedaan sandi tersebut. Setelah pihak Vendor

melakukan update pada CBS, maka pihak BPR akan melakukan koreksi LBBPR berdasarkan data yang sudah benar secara daring maksimal akhir bulan Mei 2022.

10. Berdasarkan sampling debitur terkait Kredit, dibawah ini terdapat daftar debitur dengan kekurangan kelengkapan administrasi yaitu sebagai berikut :

No	Nama Debitur	No. rekening	Plafond	Keterangan
1	RIYONO	10130000438	215.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • TIDAK ADA BERKAS PENGIKATAN TERBARU • TIDAK ADA IDEB BARU
2	ADI PURWANTO	10130000831	20.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • TIDAK ADA IDEB
3	PRIYO WIDIGDO	10130001191	95.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • TIDAK ADA IDEB
4	IPUNG SUMBAR PRASETYO	10130001334	85.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • TIDAK ADA PERHITUNGAN AGUNAN
5	RATNAWATI	10130002030	30.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • TIDAK ADA PENGIKATAN
6	SUGENG PURNOMO	10130002033	50.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • TIDAK ADA PENILAIAN AGUNAN
7	YUNI WIDODO	10130002057	7.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • TIDAK ADA PK • TIDAK ADA PENGIKATAN
9	NINIK MARDIANTI	10130002119	5.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • TIDAK ADA PENGIKATAN

Saran:

Sebaiknya bank lebih memperhatikan mengenai kelengkapan administrasi terkait tabungan, deposito, dan kredit sesuai SOP yang berlaku.

Tanggapan BPR:

Sepakat dengan temuan tersebut. Untuk selanjutnya BPR akan lebih memperhatikan kelengkapan administrasi dokumen yang ada khususnya untuk debitur, sedangkan untuk dokumen yang eksis yang masih kurang akan dilakukan pemenuhan maksimal akhir bulan Mei 2022

11. Pada tahun 2021 Terdapat 18 Rekening Kredit dengan kualitas Macet, sebesar Rp. 783.147.953,- (termasuk didalamnya ada sebanyak 5 rekening kredit macet lebih dari 2 tahun dengan jumlah sebesar Rp. 355.008.517,-) Hal ini menunjukkan Penanganan kredit bermasalah masih belum efektif dan Peningkatan Beban PPAP dari debitur macet lebih dari 2 tahun berpotensi mengurangi pendapatan BPR.

Saran :

Bank diharapkan selalu melakukan kebijakan terkait penagihan kredit dan Penyelesaian kredit Bermasalah secara intensif. Kebijakan tersebut dilakukan agar Realisasi terkait penagihan dan Penanganan kredit bermasalah tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi agar penyelesaian kredit bermasalah bisa teratasi setiap tahunnya.

Tanggapan BPR :

Sepakat dengan temuan

Selanjutnya BPR akan lebih intens dalam menangani kredit bermasalah dan selanjutnya BPR akan lebih prudent dalam analisa kredit dan survey agar tidak menimbulkan masalah baru.

12. Berdasarkan sampling terhadap 25 debitur terbesar, atas nama Suwandi dengan nomor rekening 10130000415 dan plafond Rp 98.500.000, tertera debitur memiliki hutang dengan kolektibilitas 5 (macet) di KC. Srengat berdasarkan IDEB tanggal (Informasi Debitur) 9 Feb 2018. Pada posisi 31 Desember 2020 debitur tersebut berkolektibilitas 5 (macet) di BPR Artha Praja.

Saran:

Sebaiknya Bank tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan analisis kredit dengan realisasi baru ataupun dengan fasilitas Restrukturisasi yang berkaitan dengan berkas kelengkapan kredit. Hal ini bertujuan agar potensi kredit bermasalah dapat di minimalisir.

Tanggapan BPR:

Sepakat dengan temuan, selanjutnya BPR akan lebih prudent dalam analisa kredit baik debitur baru maupun kredit restruktur.

Demikian management letter ini kami sampaikan, atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Kantor Akuntan Publik
Moh. Wildan & Adi Darmawan**



Adi Darmawan Ervanto, CPA.
Partner



PEMERINTAH KOTA BLITAR
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Kota Blitar

Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar I Telp. (0342) 815533 I Email : apb_08@yahoo.co.id

**SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PD. BPR ARTHA PRAJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elya Dwi Admoko
Alamat Kantor : Jl. Mastrip no.75
Jabatan : Direktur Utama

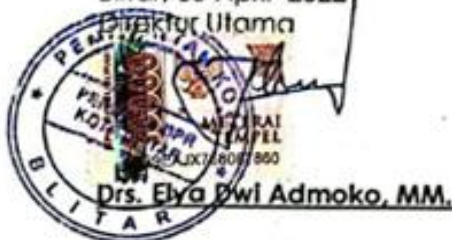
Menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **PD. BPR ARTHA PRAJA** yang disertakan dengan laporan auditor independen;
2. Laporan keuangan **PD. BPR ARTHA PRAJA** telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan **PD. BPR ARTHA PRAJA** telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan **PD. BPR ARTHA PRAJA** tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam **PD. BPR ARTHA PRAJA**.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Blitar, 05 April 2022

Direktur Utama



Drs. Elya Dwi Admoko, MM.

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
N E R A C A
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Keterangan	Catatan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
A S E T:			
Aset Lancar			
K a s		159.110.400	216.294.700
Pendapatan bunga yang akan diterima	3	0	0
Giro pada bank lain	3	3.425.937	3.590.937
Penempatan pada bank lain	4	12.998.174.845	14.365.252.303
- Penyisihan kerugian		0	0
Kredit yang diberikan	5	14.108.821.715	7.189.917.131
- Biaya Transaksi yang belum diamortisasi		17.286.625	42.731.449
- Penyisihan Penghapusan Kredit		(335.558.525)	(90.509.420)
- Kredit Yang Diberikan - Provisi & Administrasi		(205.470.241)	(227.215.170)
Jumlah aset lancar		26.745.790.756	21.500.061.930
Aset tidak lancar			
Agunan yang diambil alih	6	73.795.240	73.795.240
Aset tetap	7	502.856.950	500.976.950
- Akumulasi Penyusutan		(460.568.922)	(435.855.288)
Aset tidak berwujud bersih	8	9.698.956	16.019.798
Aset lain-lain	9	301.363.416	469.636.667
Jumlah aset tidak lancar		427.145.640	624.573.367
Jumlah Aset		27.172.936.395	22.124.635.297
KEWAJIBAN & EKUITAS:			
Kewajiban Jangka Pendek			
Kewajiban yang segera dibayar	10	571.759.480	541.276.618
Utang Bunga	11	10.293.854	11.659.895
Simpanan	12	13.434.404.157	12.424.029.872
Simpanan dari Bank Lain	13	3.500.000.000	0
Kewajiban lain-lain	14	89.533.015	128.972.720
Jumlah kewajiban Jangka Pendek		17.605.990.506	13.105.939.106
Ekuitas			
Modal disetor	15	8.000.000.000	8.000.000.000
Cadangan Umum		802.459.636	802.459.636
Cadangan Tujuan		802.459.636	802.459.636
Saldo laba/ (Rugi)		(37.973.382)	(586.223.080)
Jumlah Ekuitas		9.566.945.889	9.018.696.191
Jumlah Kewajiban & Ekuitas		27.172.936.395	22.124.635.297

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Keterangan	Catatan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN BUNGA:			
	16		
Bunga		1.998.965.748	1.865.719.567
Provisi dan Komisi		106.939.604	120.724.156
Jumlah Pendapatan Bunga		<u>2.105.905.352</u>	<u>1.986.443.723</u>
BEBAN BUNGA :			
	17		
Bunga		(472.801.993)	(494.151.079)
Pendapatan/(Beban) Bunga Bersih		<u>1.633.103.359</u>	<u>1.492.292.644</u>
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA :			
	23		
Denda Kredit yang Diberikan (Denda dan Tunggakan Bunga)		17.622.150	39.355.321
Denda Penalti Deposito		800.000	7.626.712
Kelebihan PPAP - Kredit		58.252.187	27.104.896
Kelebihan PPAP - ABA		63.422.422	64.581.499
Administrasi Lainnya		405.219.527	78.840.209
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		<u>545.316.287</u>	<u>217.508.637</u>
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			
	23		
Beban Representasi		(6.145.700)	(4.494.000)
Adm. Bank Jatim		(165.000)	(195.000)
Kontribusi Kantor Kas		(250.000)	(250.000)
Biaya kerugian Indikasi Penggelapan Teller		0	(1.033.074.147)
Biaya Adm. Kredit Komunal		(7.753.791)	0
Biaya Lainnya		(8.008.300)	0
Jumlah Beban Operasional Lainnya		<u>(22.322.791)</u>	<u>(1.038.013.147)</u>
BEBAN OPERASIONAL:			
Penyisihan Kerugian/ Penyusutan	18	(397.758.191)	(77.342.831)
Umum dan Administrasi	19	(256.151.666)	(278.399.021)
Tenaga Kerja	20	(913.918.804)	(852.341.766)
Biaya Pendidikan	21	(12.642.500)	(32.000.000)
Jumlah Beban Operasional		<u>(1.580.471.161)</u>	<u>(1.240.083.617)</u>
Jumlah Pendapatan/(Beban) Operasional Bersih		<u>(1.057.477.665)</u>	<u>(2.060.588.127)</u>
LABA/(RUGI) USAHA OPERASIONAL			
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL:			
PENDAPATAN NON OPERASIONAL			
	24	35.722.506	56.066.394
BEBAN NON OPERASIONAL			
	24	(63.098.502)	(62.693.897)
Pendapatan/(Beban) Non Operasional		<u>(27.375.996)</u>	<u>(6.627.504)</u>
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN			
		548.249.698	(574.922.987)
PAJAK PENGHASILAN			
	25	0	(11.300.094)
LABA/(RUGI) BERSIH			
		<u>548.249.698</u>	<u>(586.223.081)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Modal Disetor	Dana Setoran Modal	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Saldo Laba yang Belum Ditetapkan Penggunaannya	Jumlah
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	2.000.000.000	6.000.000.000	735.763.218	735.763.218	444.642.784	9.916.169.220
Cadangan Umum	0	0	66.696.417	0	(66.696.417)	0
Cadangan Tujuan	0	0	0	66.696.417	(66.696.417)	0
Pembagian Laba Untuk Daerah	0	0	0	0	(222.321.392)	(222.321.392)
Pembagian Jasa Produksi	0	0	0	0	(44.464.278)	(44.464.278)
Pembagian Dana Kesejahteraan	0	0	0	0	(44.464.278)	(44.464.278)
Laba/Rugi Selama tahun berjalan	0	0	0	0	(586.223.081)	(586.223.081)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	2.000.000.000	6.000.000.000	802.459.636	802.459.636	(586.223.080)	9.018.696.191
Cadangan Umum	0	0	0	0	0	0
Cadangan Tujuan	0	0	0	0	0	0
Pembagian Laba Untuk Daerah	0	0	0	0	0	0
Pembagian Jasa Produksi	0	0	0	0	0	0
Pembagian Dana Kesejahteraan	0	0	0	0	0	0
Laba/Rugi Selama tahun berjalan	0	0	0	0	548.249.698	548.249.698
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	2.000.000.000	6.000.000.000	802.459.636	802.459.636	(37.973.382)	9.566.945.889

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Keterangan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
ARUS KAS DARI:		
Kegiatan Usaha:		
Laba (Rugi) Selama Tahun Berjalan	548.249.698	(586.223.081)
Penyesuaian:		
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	0	(90.509.420)
Penyusutan dan Amortisasi	24.713.635	41.954.616
Perubahan Modal Kerja:		
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	0	76.489.178
Kredit Yang Diberikan	(6.670.155.584)	358.237.164
Aset yang tidak berwujud	6.320.842	(8.004.167)
Aset Lain-lain	168.273.251	742.569.739
Agunan Yang diambil alih	0	(73.795.240)
Kewajiban Yang Segera Dibayar	30.482.862	60.056.632
Utang Bunga	(1.366.041)	892.633
Utang Pajak	0	
Simpanan	1.010.374.285	2.142.970.508
Simpanan Dari Bank Lain	3.500.000.000	0
Kewajiban Lain-lain	(39.439.705)	9.532.818
Kas bersih untuk kegiatan usaha	(1.422.546.758)	2.674.171.379
Kegiatan Investasi:		
Penambahan Aset tetap	(1.880.000)	(35.059.000)
Kas bersih untuk kegiatan investasi	(1.880.000)	(35.059.000)
Kegiatan Pendanaan:		
Pembagian Laba Untuk Daerah	0	(222.321.392)
Kas bersih dari kegiatan pendanaan	0	(311.249.948)
Kenaikan/(Penurunan) bersih Kas dan Setara Kas	(1.424.426.758)	2.327.862.431
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	14.585.137.940	12.257.275.509
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	13.160.711.182	14.585.137.940
Kas dan Setara Kas terdiri dari:		
Kas	159.110.400	216.294.700
Penempatan pada bank lain	13.001.600.782	14.368.843.240
Jumlah Kas dan Setara Kas	13.160.711.182	14.585.137.940

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

1 UMUM

a. Pendirian

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Artha Praja Kota Blitar didirikan di Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar tanggal 21 Juli 2004, dan telah mendapatkan ijin usaha dari Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 9/25/KEP.GBI/DpG/2007 pada tanggal 13 Juni 2007 di Jakarta. Keputusan Wali Kota Blitar No: 188/791/HK/410.010.2/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar, penambahan modal disetor ini telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia Nomor 14/53/DKBU/IDAd/Kd tanggal 6 Februari 2012. Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, menetapkan besarnya penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Artha Praja" Kota Blitar sebesar Rp 15.000.000.000 sehingga modal dasar menjadi Rp 17.000.000.000. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2004 tentang perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar.

b. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan pendirian Bank adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, dan atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit/ pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, pertanian, industri dan bidang usaha lainnya khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah serta kepada karyawan, PNS, maupun TNI/ POLRI yang menerima penghasilan dari Kas Negara/ Kas Daerah dan kantor-kantor pembayaran gaji yang berkedudukan di Kota Blitar berdasarkan kemampuan modal PD. BPR dengan syarat-syarat yang telah ditentukan,
3. Melakukan kerjasama antar BPR dan dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito, dan Tabungan Bank Lainnya.
5. Menjalankan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Susunan pengurus

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Blitar No. 188/483/HK/410.010.2/2018 tanggal 26 Desember 2018 dan No. 188/185/HK/410.010.2/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Jabatan Direktur Utama ,adapun susunan Dewan Direksi dan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja adalah sebagai berikut:

Anggota Dewan	: Tn. Dite Mahargono
Direktur Utama	: Tn. Drs. Elya Dwi Admoko, MM.

d. Permodalan

Sesuai Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/412/HK/410.010.2/2018 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Artha Praja" Kota Blitar Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Blitar menambah Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Artha Praja" Kota Blitar sebesar Rp 1.500.000.000,-. Dengan penambahan modal tersebut, maka jumlah Modal Disetor sampai tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berjumlah Rp8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah).

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)
Pemerintah Kota Blitar	8.000.000.000	100%
Jumlah Modal Disetor	8.000.000.000	100%

e. Lokasi Bank

Bank berkantor pusat di Jl. Mastrip No. 75, Kel. Kepanjen Kidul Kota Blitar.
 Bank memiliki 1 (satu) kantor kas, dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Keterangan	Lokasi
1	Kantor Kas	Jl. Dr Wahidin No. 105 Kota Blitar

Sumber daya manusia bank sebanyak 14 (empat belas) orang, terdiri dari 13 (tiga belas) orang karyawan, dan 1 (satu) orang direksi. Atas jumlah karyawan sebanyak 13 (tiga belas) orang terklasifikasi sebagai berikut:

No.	Bidang Tugas Karyawan	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawalan		
			Tetap (1)	Tidak Tetap (2)	Total (1+2)
1	Pemasaran	S1	2	0	2
		SMA	1	0	1
2	Operasional	S1	2	3	5
		D3	1	0	1
		SMA	1	0	1
		SMK	0	0	0
3	Umum	S1	2	0	2
		SMA	1	1	2
Total			10	4	14

2 **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Berikut ini kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan bank.

a. **Dasar penyajian laporan keuangan**

Bank telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR) untuk penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan ke dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode tidak langsung.

b. **Transaksi hubungan istimewa**

Pihak-pihak yang dianggap memiliki hubungan istimewa adalah:

- 1 Perusahaan baik langsung maupun yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan bank (termasuk *holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries*);

**PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

- 2 Perusahaan asosiasi (*associated company*);
- 3 Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di bank yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan bank);
- 4 Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan bank yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari bank serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut;
- 5 Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari bank dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan bank.

Semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

Dalam kegiatan operasionalnya, bank mengadakan transaksi perbankan yang normal dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, transaksi tersebut meliputi pemberian kredit dan pendanaan.

c. Giro pada bank lain

Giro pada bank lain disajikan sebesar saldo giro, bank tidak menetapkan penyisihan penghapusan atas giro pada bank lain.

d. Pendapatan bunga yang akan diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

e. Penempatan pada bank lain

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan penghapusan penempatan. Penyisihan tersebut merupakan cadangan yang dibentuk sebesar persentase yang ditetapkan dari saldo penempatan pada tanggal neraca berdasarkan penggolongan kualitas penempatan pada bank lain. Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh dana yang ditempatkan di bank lain.

f. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan dinyatakan sebesar saldo kredit/baki debit dikurangi dengan penyisihan penghapusan kredit, dikurangi provisi kredit dan ditambah biaya transaksi yang belum diamortisir. Penyisihan tersebut merupakan cadangan yang dibentuk sebesar persentase yang ditetapkan dari saldo kredit yang diberikan pada tanggal neraca berdasarkan penggolongan kualitas kredit yang diberikan. Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan.

**PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

Kredit diklasifikasikan "*non-performing*" pada saat pokok kredit telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga kredit tersebut diragukan. Pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya disajikan dalam pendapatan bunga yang akan diterima. Pendapatan bunga kredit yang telah diklasifikasikan sebagai "*non-performing*" tidak diperhitungkan dan dicatat sebagai tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian) serta diakui pendapatan pada saat diterima.

Kredit dihapuskan pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut sudah tidak akan tertagih lagi. Penerimaan kembali kredit yang dihapus buku diakui sebagai pendapatan operasional lainnya.

g. Penyisihan penghapusan aset produktif

Kebijakan Tahun 2021:

Aset produktif terdiri dari kredit yang diberikan, Sertifikat Bank Indonesia, Penempatan pada Bank Lain (tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan dan penanaman dana lainnya yang sejenis).

Bank membentuk penyisihan penghapusan aset produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi berdasarkan penelaahan terhadap kualitas masing-masing aset produktif, komitmen dan kontinjensi sesuai ketentuan Bank Indonesia. Bank membentuk penyisihan aset produktif berdasarkan penelaahan berdasarkan kolektibilitas masing-masing aset produktif pada akhir periode.

Kebijakan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) ditentukan berdasarkan POJK Republik Indonesia nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan aset produktif Bank Pengkreditan Rakyat.

Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan resiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan maupun dana yang ditempatkan di Bank lain.

Aset produktif dihapuskan dan penyisihan penghapusan aset produktif pada saat manajemen berpendapat bahwa aset produktif tersebut harus dihapuskan karena secara operasional debitur atau Bank lain tempat menempatkan dana sudah tidak mampu lagi membayar.

Pada tahun 2018 Kebijakan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) ditentukan berdasarkan PBI No. 13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 sedangkan pada tahun 2019 mengacu pada POJK Republik Indonesia nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan aset produktif Bank Pengkreditan Rakyat tanggal 27 Desember 2018. Maka klasifikasi aset produktif dan pembentukan aset produktif BPR adalah sebagai berikut:

Klasifikasi / Kualitas Kredit	Prosentase	Keterangan
PPAP Umum		
- Lancar	0,5%	dari nilai aset produktif kualitas lancar
PPAP Khusus		
- Dalam Perhatian Khusus	0,5%	dari nilai aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan
- Kurang Lancar	10%	dari nilai aset produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan
- Diragukan	50%	dari nilai aset produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan
- Macet	100%	dari nilai aset produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Penerapan pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus dilakukan secara bertahap yaitu :

- a. 0,5% (nol koma lima persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020
- b. 1% (satu persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2021
- c. 3% (tiga persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021

Penetapan nilai agunan yang diperhitungkan untuk PPAP diklasifikasikan sebagai berikut :

No	Keterangan Agunan	Prosentase
a.	Agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai.	100%
b.	Nilai pasar untuk agunan emas perhiasan.	85%
c.	Nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia.	80%
d.	Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai resi gudang.	70%
e.	Nilai jual obyek pajak (NJOP) atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah, dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.	60%
f.	Nilai jual obyek pajak (NJOP) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Keterangan NJOP terakhir dari instansi yang berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa Surat pengakuan tanah adat.	50%
g.	Harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap yang disertai bukti kepemilikan atau surat ijinnya yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat/disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lainnya yang berwenang.	50%
h.	Nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	50%
i.	Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.	50%

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

j.	Bagian dari Kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat.	50%
k.	Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.	30%

Prosentase penyisihan penghapusan diatas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut.

Terkait penerapan pasal 17 ayat (3) dan (4) POJK No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang perubahan atas PBI No. 13/26/PBI/2011 tentang kualitas aktiva produktif dan PPAP BPR, yang menyatakan bahwa :

- a. Nilai agunan sebagai pengurang PPAP kredit macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada klasifikasi huruf c, huruf e sampai dengan huruf g:
 - ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet; dan
 - tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.
- b. Nilai agunan sebagai pengurang PPAP kredit macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada klasifikasi huruf h:
 - ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet; dan
 - tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.

Berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebijakan penetapan kualitas aset ; dan
 - b. Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Kebijakan bagi BPR/BPRS sebagai dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 khususnya Bab II Pasal 3 Penyisihan Penghapusan Aset Produktif sebagai berikut :

**PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

BPR atau BPRS dapat :

- a. membentuk penyisihan penghapusan aset produktif umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) dari aset produktif dengan kualitas lancar ; atau
- b. tidak membentuk penyisihan penghapusan aset produktif umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar,

sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif.

Kebijakan Tahun 2021:

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.03/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagai berikut :

Perubahan ketentuan ayat (4) Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) BPR atau BPRS dapat menerapkan kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
- (2) Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) terdiri atas:
 - a pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif;
 - b perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum;
 - c perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank; dan/atau
 - d penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
- (3) BPR atau BPRS dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- (4) Dalam hal BPR atau BPRS menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR atau BPRS harus melakukan:
 - a penyesuaian pedoman atas seluruh kebijakan yang diterapkan;
 - b Dokumentasi dan administrasi yang memadai atas seluruh kebijakan yang diterapkan; dan
 - c simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan terhadap kecukupan permodalan dan likuiditas BPR dan BPRS.
- (5) Dokumentasi dan administrasi atas masing-masing kebijakan yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:
 - a Penyisihan penghapusan aset produktif:
 - Jumlah penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif; dan
 - Realisasi jumlah penyisihan penghapusan aset produktif yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,
 - b perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti BPR dan BPRS dalam
 - c perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank; dan/atau
 - d penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia:
- (1) Jumlah biaya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan

**PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

- (2) Realisasi biaya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia BPR dan BPRS sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- Perubahan ketentuan Pasal 7 A sebagai berikut :
- (1) BPR atau BPRS melakukan simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c secara periodik.
 - (2) Periode simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPR dan BPRS sesuai dengan kondisi dan kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing BPR dan BPRS.
 - (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan periode simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan lebih cepat dari periode yang ditetapkan oleh BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS menyampaikan hasil simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana tindak jika diperlukan.
 - (5) Hasil simulasi perhitungan dan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, BPR atau BPRS menyampaikan hasil simulasi perhitungan dan rencana tindak pada hari kerja berikutnya.
- Perubahan ketentuan Pasal 7 B sebagai berikut :
- (1) Dalam hal BPR atau BPRS melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem, BPR atau BPRS wajib memastikan pembagian dividen dan/atau tantiem tidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum.
 - (2) Dalam memastikan dampak pembagian dividen dan/atau tantiem terhadap kecukupan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR atau BPRS wajib memperhitungkan paling sedikit penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b.
 - (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk menyampaikan hasil perhitungan dampak pembagian dividen dan/atau tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, BPR atau BPRS menyampaikan hasil perhitungan dampak pembagian dividen dan/atau tantiem pada hari kerja berikutnya.
 - (5) BPR atau BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
 - (6) Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPR atau BPRS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau 4 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
 - b larangan sebagai pihak utama sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

h. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Seluruh aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomisnya dengan tarif penyusutan sebagai berikut:

Jenis Aset	Masa Manfaat	Prosentase
Kendaraan	4 dan 8 Tahun	25% dan 12,5%
Inventaris	2 dan 8 Tahun	50% dan 12,5%

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke laporan laba-rugi pada saat terjadinya. Pemugaran dan perbaikan yang meningkatkan produktifitas aset tetap dalam jumlah material dikapitalisasi dalam *cost asset* yang bersangkutan. Aset yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang diperoleh/diderita dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

i. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka dinyatakan sebesar jumlah yang dibayarkan dan diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Agunan yang diambil alih

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Agunan Yang Diambil Alih, khususnya pasal 27 dan 28:

1. BPR dapat mengambil alih agunan untuk penyelesaian Kredit yang memiliki kualitas macet.
2. Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud bersifat sementara.
3. Pengambilalihan agunan harus disertai dengan surat penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari debitur dan surat keterangan lunas dari BPR kepada debitur.
4. BPR wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan untuk menetapkan nilai realisasi bersih.
5. Penilaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan :
 - a. untuk AYDA dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan oleh penilai intern BPR; dan
 - b. untuk AYDA dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan oleh penilai independen.
6. Penilaian AYDA wajib dilakukan terhadap setiap agunan.
7. BPR wajib melakukan penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi BPR, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal AYDA mengalami penurunan nilai karena penilaian kembali, maka BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian.
 - b. dalam hal AYDA mengalami peningkatan nilai karena penilaian kembali, maka BPR dilarang mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai realisasi bersih. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih yang telah diterima pada saat kredit diambil alih, dibebankan ke dalam akun penyisihan penghapusan aset produktif. Sedangkan selisih lebih nilai realisasi bersih di atas saldo kredit, agunan yang diambil alih diakui maksimum sebesar saldo kredit dan selisihnya dicatat dalam catatan administratif bank.

**PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pemeliharaan dan pengambilalihan agunan tersebut dibebankan pada beban operasi saat terjadi.

Laba atau rugi yang diperoleh/diderita akibat dari realisasi penjualan agunan yang diambil alih dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

k. Utang bunga

Utang bunga merupakan kewajiban bank yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi bank, termasuk didalamnya adalah kewajiban bunga yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo.

l. Simpanan dari pihak ketiga dan bank lain

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (diluar bank umum atau BPR lain) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Simpanan berupa tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Tabungan disajikan sebesar nilai kewajiban kepada pemilik tabungan.

Simpanan deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpan dan bank. Deposito berjangka disajikan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito atau yang diperjanjikan.

Simpanan dari bank lain adalah kewajiban bank kepada bank lain dalam bentuk tabungan dan deposito. Tabungan disajikan sebesar kewajiban kepada bank lain pemilik tabungan dan deposito yaitu sebesar jumlah nominalnya atau sebesar kewajiban bank yang diperjanjikan.

m. Kewajiban imbalan kerja

Kewajiban imbalan kerja adalah kewajiban yang timbul dari imbalan kerja. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan bank atas jasa yang diberikan oleh pekerja.

Kewajiban imbalan kerja terdiri dari:

- 1 Kewajiban imbalan kerja jangka pendek.
- 2 Kewajiban imbalan pasca kerja.
- 3 Kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya.
- 4 Kewajiban pesangon pemutusan kerja.

BPR melakukan pemenuhan kewajiban imbalan pasca kerja dengan metode iuran pasti yang dananya dikelola oleh melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Manajemen BPR berpendapat bahwa imbalan pasca kerja tersebut telah mencukupi sesuai dengan aturan dan standar akuntansi yang berlaku.

n. Pinjaman dari pihak ketiga dan bank lain

Pinjaman yang diterima terdiri dari pinjaman dari bank lain dan dari pihak ketiga bukan bank. Pinjaman yang diterima diakui sesuai dengan jumlah kewajiban terhadap bank lain dan pihak ketiga bukan bank tersebut.

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

o. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan bunga diperoleh dari penanaman dana bank pada aset produktif, berasal dari kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia. Pendapatan bunga meliputi pendapatan bunga kontraktual serta amortisasi provisi, diskonto dikurangi biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif dimaksud serta amortisasi pendapatan bunga tangguhan.

Pendapatan bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas aset "*non-performing*" diakui sebagai pendapatan pada saat diterima. Pendapatan bunga yang diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*. Pendapatan bunga atas aset *non-performing* yang belum diterima dilaporkan sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian dalam laporan komitmen dan kontinjensi.

Provisi adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase. Pendapatan bunga – provisi yang signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu diperlakukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya. Amortisasi tersebut diakui sebagai penambah pendapatan bunga. Saldo pendapatan provisi sehubungan dengan kredit yang telah selesai sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan pada saat penyelesaian. Pendapatan provisi yang tidak berkaitan langsung dengan perkreditan atau jangka waktu diakui pada saat transaksi dilakukan.

Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan aset produktif yang ditanggung oleh bank. Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung bank diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan bunga.

Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman.

Beban bunga meliputi bunga kontraktual, amortisasi provisi, administrasi dan biaya transaksi.

Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban bank, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana seperti hadiah dan cash back, yang terkait secara langsung dengan penghimpunan dana.

p. Perpajakan

Berdasarkan PP No. 23/2018 terkait Jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah bagi Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan tarif final dan Perusahaan dengan badan berbentuk Perseroan terbatas adalah paling lama 3 (tiga) Tahun Pajak, Sehingga pada tahun 2021, Bank menerapkan perhitungan PPh 25 Badan dengan tarif 22%.

Bank mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut. Bank mengakui adanya pajak tangguhan.

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

3 GIRO PADA BANK LAIN

	2021	2020
Pihak Ketiga :		
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	3.425.937	3.590.937
Jumlah Giro Pada Bank Lain	<u>3.425.937</u>	<u>3.590.937</u>

4 PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	2021	2020
Tabungan:		
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	1.547.849.743	5.089.016.452
PT. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk	2.005.993.920	1.161.551.799
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	2.390.206.148	2.406.833.427
PT. Tabungan Bank Jatim	991.027	793.131
PT. CIMB Syariah	76.909.551	76.757.495
PT. Syariah Panin	300.000	300.000
BPR SAU Surabaya	295.924.456	0
Jumlah Tabungan	<u>6.318.174.845</u>	<u>8.735.252.303</u>

Deposito:

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	1.030.000.000	1.030.000.000
PT. BPRS Bhakti Sumekar	450.000.000	950.000.000
PD. BPR Bank Daerah Kab. Madiun	0	500.000.000
PT. BPRS Magetan	750.000.000	750.000.000
PD. Bank Perkreditan Rakyat Kab. Jombang	0	450.000.000
PD. BPR Bank Daerah Tulungagung	1.000.000.000	1.000.000.000
PT. BPRS Mojokerto	950.000.000	950.000.000
PD. BPR Tugu Artha	1.500.000.000	0
PT. BPR Majatama	1.000.000.000	0
Jumlah Deposito	<u>6.680.000.000</u>	<u>5.630.000.000</u>
Jumlah penempatan pada bank lain	12.998.174.845	14.365.252.303
Dikurangi penyisihan penghapusan pada bank lain	0	0
Jumlah penempatan pada bank lain bersih	<u>12.998.174.845</u>	<u>14.365.252.303</u>

Suku bunga tabungan per tahun

0,5% - 2,00%

Suku bunga Deposito per tahun

5,75% - 8,50%

Kolektibilitas penempatan pada bank lain pada 31 Desember 2021 dan 2020 dikelompokkan lancar.

Perubahan penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain

Saldo awal	0	60.757.578
Pembentukan di Tahun Berjalan	63.422.422	3.823.921
Penyesuaian PPAP	(63.422.422)	(64.581.498)
Saldo akhir	<u>0</u>	<u>0</u>

5 KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Kredit Yang Diberikan Bersih

	2021	2020
Jumlah kredit yang diberikan	14.108.821.715	7.189.917.131
Ditambah Biaya Transaksi yang belum diamortisasi	17.286.625	42.731.449
Dikurangi penyisihan penghapusan kredit	(335.558.525)	(90.509.420)
Dikurangi provisi yang belum diamortisasi	(205.470.241)	(227.215.170)
Jumlah kredit yang diberikan bersih	<u>13.585.079.574</u>	<u>6.914.923.990</u>

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Menurut Kolektabilitasnya, kredit yang diberikan dirinci sebagai berikut :

Keterangan	31/12/2021	
	Rp	%
Lancar	12.815.268.673	90,83%
Dalam Perhatian Khusus	221.746.559	1,57%
Kurang Lancar	205.113.588	1,45%
Diragukan	83.544.942	0,59%
Macet	783.147.953	5,55%
Kredit NPL	1.071.806.483	7,60%
Jumlah	14.108.821.715	100%

Menurut Kolektabilitasnya, kredit yang diberikan dirinci sebagai berikut :

Keterangan	31/12/2020	
	Rp	%
Lancar	6.230.953.019	86,66%
Dalam Perhatian Khusus	83.040.879	1,15%
Kurang Lancar	49.723.316	0,69%
Diragukan	109.495.711	1,52%
Macet	716.704.206	9,97%
Kredit NPL	875.923.233	12,18%
Jumlah	7.189.917.131	100%

b. Mutasi penyisihan penghapusan kredit adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Saldo Awal	90.509.420	91.045.855
Penyisihan kredit selama tahun berjalan	303.301.292	26.568.461
Pemulihan PPAP	(58.252.187)	(27.104.896)
Saldo Akhir	<u>335.558.525</u>	<u>90.509.420</u>

Kredit tersebut dijamin dengan hak tanggungan atau kuasa untuk membebaskan hak tanggungan atau menjual, atau dengan jaminan lain yang dapat diterima bank.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya kredit yang diberikan serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

6 AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

	2021	2020
Agunan Yang Diambil Alih	73.795.240	73.795.240
Jumlah	<u>73.795.240</u>	<u>73.795.240</u>

7 ASET TETAP

	2021	2020
Harga perolehan:		
Kendaraan	231.358.000	231.358.000
Inventaris	271.498.950	269.618.950
Jumlah	<u>502.856.950</u>	<u>500.976.950</u>

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Akumulasi penyusutan:		
Gedung		
Kendaraan	226.863.495	222.368.995
Inventaris	233.705.428	213.486.293
J u m l a h	<u>460.568.922</u>	<u>435.855.288</u>
Nilai Buku:		
Kendaraan	4.494.505	8.989.005
Inventaris	37.793.522	56.132.657
J u m l a h	<u>42.288.028</u>	<u>65.121.662</u>
8 ASET TIDAK BERWUJUD	2021	2020
Harga Perolehan		
Aset Tidak Berwujud berupa (Software)	136.705.200	136.705.200
Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Aset Tidak Berwujud berupa (Software)	127.006.243,80	120.685.402
Nilai Buku	<u>9.698.956</u>	<u>16.019.798</u>
9 ASET LAIN-LAIN	2021	2020
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima :		
Penempatan pada bank lain	13.222.686	15.072.429
Kredit Kapas	20.879.651	23.222.125
Kredit Kanal	40.457.678	24.507.506
Kredit Kamus 4	80.646	288.066
Kredit Kamus 6	20.474.096	979.839
Kredit Kakap	34.928	108.135
BDD - Sewa Gedung Kantor Kas	33.345.834	34.855.834
BDD Sewa Rumah	0	10.000.000
BDD Bunga Desika Sis	19.130.143	38.160.050
BDD Pajak	6.692.440	0
Materai	786.000	186.000
Persekot Deposit (PT. Energindo)	4.174.477	2.041.207
Persediaan Souvenir	200.000	1.285.000
Persediaan Spesimen	1.330.000	1.330.000
Persekot kegiatan Bansos	0	4.426.100
Provisi Kredit dibayar dimuka	34.541.386	68.869.542
Administrasi Kredit dibayar dimuka	9.288.023	25.691.931
Asuransi Kredit dibayar dimuka	16.775.895	35.872.078
Angsuran Kredit Dibayar Dimuka	22.212.222	68.847.090
Meterai Kredit Dibayar Dimuka	322.442	698.883
Map Dibayar Dimuka	61.387	213.642
Biaya Notaris Dibayar Dimuka	4.530.562	16.236.111
Tabungan Dibayar Dimuka	62.217	85.413
Iuran BPJS Kesehatan	187.742	628.687
Iuran BPJS Kes (Keluarga)	195.461	199.461
Biaya Bantuan jasa hukum	51.000.000	51.000.000
Lainnya	1.377.500	44.831.538
J u m l a h	<u>301.363.416</u>	<u>469.636.667</u>

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

10 KEWAJIBAN YANG SEGERA DIBAYAR

	2021	2020
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	6.098.225	6.614.715
Pajak penghasilan pasal 21 tahun 2013	3.293.581	3.293.581
Pajak penghasilan pasal 21	1.900.563	1.000.000
Pajak penghasilan pasal 23 (Badan)	0	859.386
Pajak penghasilan final (PP 23 -Badan)	0	31.558
Titipan Angsuran Kredit Nasabah	10.806.872	10.753.463
Titipan Biaya Penagihan BG Kapas	0	1.295.187
Titipan Operasional Kredit	2.630.411	2.630.411
Titipan Notaris	8.758.500	11.233.500
Titipan Jamkrida	2.097.290	88.944
Titipan Al Amin	2.081.049	4.476.011
Titipan Modin dan Juru Kunci	0	282.000
Titipan Angsuran Nasabah Khusus	345.908.866	264.434.943
Titipan Pembagian Bansos	0	9.105.000
Titipan Lainnya	188.184.123	225.177.920
Jumlah	<u>571.759.480</u>	<u>541.276.618</u>

11 UTANG BUNGA

	2021	2020
Bunga deposito	9.629.471	10.705.286
Bunga deposito Sis	664.383	954.609
Jumlah	<u>10.293.854</u>	<u>11.659.895</u>

12 SIMPANAN

	2021	2020
Tabungan:		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	14.942.883	15.774.966
Pihak ketiga	10.386.661.274	9.193.254.906
Jumlah	<u>10.401.604.157</u>	<u>9.209.029.872</u>
Klasifikasi nilai nominal tabungan:		
Tabungan sampai dengan Rp. 7.500 ribu	2.722.303.379	2.342.664.448
Tabungan diatas Rp.7.500 ribu sampai dengan Rp100.000 ribu	2.754.655.103	2.102.911.739
Tabungan diatas Rp.100.000 ribu sampai dengan Rp500.000 ribu	1.242.771.429	1.407.327.829
Tabungan diatas Rp.500.000 ribu sampai dengan Rp1.000.000 ribu	645.583.056	530.273.128
Tabungan diatas Rp.1.000.000 ribu sampai dengan Rp2.000.000 ribu	3.036.291.190	2.825.852.728
Jumlah	<u>10.401.604.157</u>	<u>9.209.029.872</u>
Suku bunga tabungan per tahun	2,00% - 3,00%	2,00% - 3,00%
Tabungan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama seperti dilakukan dengan pihak ketiga.		
Deposito berjangka:		
Pihak ketiga	3.032.800.000	3.215.000.000
Jumlah	<u>3.032.800.000</u>	<u>3.215.000.000</u>

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Jangka waktu:		
3 Bulan	419.500.000	389.500.000
6 Bulan	555.300.000	402.000.000
12 Bulan	315.000.000	2.023.500.000
> 12 bulan	1.743.000.000	400.000.000
Jumlah	3.032.800.000	3.215.000.000
Klasifikasi nilai nominal deposito berjangka:		
Deposito sampai dengan Rp. 7.500 ribu	73.400.000	69.000.000
Deposito diatas Rp.7.500 ribu sampai dengan Rp100.000 ribu	1.302.500.000	1.786.000.000
Deposito diatas Rp.100.000 ribu sampai dengan Rp500.000 ribu	1.656.900.000	1.360.000.000
Jumlah	3.032.800.000	3.215.000.000
Suku bunga deposito per tahun	0,50% - 6,00%	0,50% - 6,50%
Deposito berjangka dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama seperti dilakukan dengan pihak ketiga.		
Jumlah Simpanan	13.434.404.157	12.424.029.872

13 SIMPANAN DARI BANK LAIN

	2021	2020
Deposito		
Perseroda BPR Bank Jombang	2.000.000.000	0
PT. BPR Kota Pasuruan	1.500.000.000	0
Jumlah	3.500.000.000	0
J U M L A H	3.500.000.000	0
Suku bunga simpanan dari bank lain berupa tabungan per tahun		

14 KEWAJIBAN LAIN-LAIN

	2021	2020
Biaya Penagihan BG Kapas	12.931.903	31.613.083
Biaya Penagihan AO Kapas	30.000	30.000
Biaya Penagihan AO Kanal	16.387.550	24.041.075
Biaya Penagihan AO Kamus	2.635.000	3.760.000
Cadangan Jasa Pengabdian Pengurus	23.407.075	23.407.075
Cadangan pendidikan	15.497.464	24.477.464
Cadangan Jasa Program Multiguna	15.000.000	18.000.000
Lainnya	3.644.023	3.644.023
Jumlah	89.533.015	128.972.720

15 MODAL

	2021	2020
Modal Dasar	17.000.000.000	17.000.000.000
Belum Disetor	(9.000.000.000)	(9.000.000.000)
Jumlah Modal Disetor	8.000.000.000	8.000.000.000

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Saldo Laba		
Cadangan Umum	802.459.636	802.459.636
Cadangan Tujuan	802.459.636	802.459.636
Belum Ditentukan Tujuannya	0	(571.716.221)
Jumlah Saldo Laba	1.604.919.271	1.033.203.050
Jumlah Ekuitas	9.604.919.271	9.033.203.050

16 PENDAPATAN BUNGA

	2021	2020
Pendapatan Bunga dari Pihak ketiga Bank:		
Tabungan pada bank lain	131.232.579	109.619.480
Deposito berjangka pada bank lain	318.574.939	478.613.757
Jumlah	<u>449.807.517</u>	<u>588.233.237</u>
Pendapatan bunga dari pihak ketiga bukan bank:		
Kredit yang diberikan	1.549.158.231	1.277.486.330
Jumlah	<u>1.998.965.748</u>	<u>1.865.719.567</u>
Pendapatan Provisi dan Komisi:		
Provisi dan Komisi Kredit	121.213.566	102.758.884
Biaya Administrasi	74.274.113	64.702.559
Biaya Transaksi	(21.154.137)	(30.008.562)
Biaya Transaksi Lainnya	(35.854.929)	(1.357.500)
Koreksi atas pendapatan bunga	(31.539.009)	(15.371.225)
Jumlah	<u>106.939.604</u>	<u>120.724.156</u>
Jumlah Pendapatan Bunga	<u><u>2.105.905.352</u></u>	<u><u>1.986.443.723</u></u>

17 BEBAN BUNGA

	2021	2020
a. Beban bunga pada bank lain:		
Tabungan	256.810.084	279.240.241
Deposito berjangka	171.526.356	176.609.395
b. Beban bunga pada pihak ketiga bukan bank:		
Lainnya	0	0
c. Beban bunga lainnya	25.775.367	19.767.507
d. Koreksi atas pendapatan bunga	0	0
e. Biaya transaksi	18.690.187	18.533.936
Jumlah Beban Bunga	<u>472.801.993</u>	<u>494.151.079</u>

18 BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN/ PENYUSUTAN

	2021	2020
Penyisihan kerugian ABA	63.422.422	3.823.921
Penyisihan kerugian kredit	303.301.292	26.568.461
Penyusutan peralatan elektronik dan kantor	20.219.134	17.694.492
Penyusutan kendaraan	4.494.500	24.260.125
Amortisasi aset tidak berwujud	6.320.842	4.995.833
Jumlah	<u>397.758.191</u>	<u>77.342.831</u>

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

19 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2021	2020
Premi asuransi	30.813.147	26.553.100
Sewa	40.965.000	40.965.000
Pajak-Pajak (kecuali PPh)	2.718.000	2.827.300
Pemeliharaan dan perbaikan (gedung, investasi)	55.927.538	62.679.784
Barang dan Jasa (ATK, telepon, listrik, air dll)	125.727.981	145.373.837
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	<u>256.151.666</u>	<u>278.399.021</u>

20 BEBAN TENAGA KERJA

	2021	2020
Gaji dan upah	429.978.779	386.750.000
Honorarium	81.970.000	101.940.000
Tunjangan istri dan anak	36.385.000	33.100.000
Tunjangan jabatan	116.700.000	109.800.000
Tunjangan natura	36.224.556	34.890.656
Tunjangan transport	28.442.432	30.487.099
Jasa pengabdian pengurus	0	6.222.511
Tunjangan prestasi	119.950.000	97.200.000
Biaya lembur	1.602.000	2.351.500
Biaya Insentif Gaji 13	62.666.037	49.000.000
Biaya Pengganti Service (Pems Lepas)	0	600.000
Jumlah Beba Tenaga Kerja	<u>913.918.804</u>	<u>852.341.766</u>

21 BEBAN PENDIDIKAN

	2021	2020
Biaya Pendidikan	12.642.500	32.000.000
Jumlah	<u>12.642.500</u>	<u>32.000.000</u>

22 BEBAN PEMASARAN

	2021	2020
Biaya Iklan dan Promosi	0	0
Jumlah	<u>0</u>	<u>0</u>

23 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

	2021	2020
Pendapatan Operasional Lainnya:		
Denda Kredit yang Diberikan (Denda dan Tunggakan Bunga)	17.622.150	39.355.321
Denda Penalti Deposito	800.000	7.626.712
Kelebihan PPAP - Kredit	58.252.187	27.104.896
Kelebihan PPAP - ABA	63.422.422	64.581.499
Administrasi Lainnya	405.219.527	78.840.209
Jumlah	<u>545.316.287</u>	<u>217.508.637</u>

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Beban Operasional Lainnya:

Beban Representasi	6.145.700	4.494.000
Adm. Bank Jatim	165.000	195.000
Kontribusi Kantor Kas	250.000	250.000
Biaya kerugian Indikasi Penggelapan Teller	0	1.033.074.147
Biaya Adm. Kredit Komunal	7.753.791	0
Biaya Lainnya	8.008.300	0
Jumlah	<u>22.322.791</u>	<u>1.038.013.147</u>
Jumlah Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	<u>522.993.496</u>	<u>(820.504.510)</u>

24 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

	2021	2020
Pendapatan Non Operasional:		
Pembulatan kas	17.834	18.877
Pendapatan Materai	710.500	691.500
Administrasi permohonan kredit	2.385.000	2.647.000
Pendapatan PPOB	812.191	1.057.967
Lainnya	31.796.982	51.651.050
Jumlah Pendapatan Non Operasional	<u>35.722.506</u>	<u>56.066.394</u>
Beban Non Operasional:		
Biaya perbarindo	9.000.000	9.000.000
Biaya perbamida	6.000.000	6.000.000
Biaya tahunan OJK	10.000.000	10.000.000
Jasa pihak luar	2.540.000	1.230.000
Biaya rapat	14.500.000	16.074.800
Kegiatan pemkot/ instansi	3.455.000	2.500.000
Sumbangan	500.000	1.050.000
Biaya sewa rumah dinas	10.000.000	10.000.000
Biaya kegiatan korpri	322.000	257.000
Biaya Rekrutmen SDM	300.000	1.661.500
Biaya Lainnya	6.481.502	4.920.597
Jumlah Beban Non Operasional	<u>63.098.502</u>	<u>62.693.897</u>
Jumlah	<u>(27.375.996)</u>	<u>(6.627.504)</u>

25 PAJAK PENGHASILAN

	2021	2020
<u>PPh final berdasarkan PP No. 23</u>		
Jumlah Peredaran Bruto Jan sd Des 2020	0	2.260.018.753
Jumlah PPh final 0,5%		<u>11.300.094</u>
Jumlah Pajak Penghasilan	<u>0</u>	<u>11.300.094</u>
Dikurangi pajak dibayar dimuka :		
PPh disetor	0	(11.268.536)
Jumlah pajak penghasilan kurang/(lebih) bayar	<u>0</u>	<u>31.558</u>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	548.249.698	

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Koreksi Fiskal:	
Positif:	
Kegiatan pemkot/ instansi	3.455.000
Sumbangan	500.000
Perbaruan SIM direksi	375.000
Biaya Natura	36.224.556
Laba kena pajak setelah Koreksi Fiskal	588.804.254
Kompensasi Kerugian	(588.804.254)
Laba (Rugi) Setelah Kompensasi Fiskal	0
Pajak Penghasilan:	
50% x 22% x PKP yang memperoleh fasilitas	0
Jumlah pajak penghasilan	0
Kredit Pajak:	
Uang Muka PPh 25	(6.692.440)
Jumlah Kurang/(Lebih Bayar Pajak) - PPh 29	(6.692.440)

26 INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

	2021	2020
Aset:		
Kredit yang diberikan	40.461.995	39.902.466
Kewajiban :		
Tabungan	14.942.883	15.774.966
Deposito Berjangka	0	0
	2021	2020
Aset:		
Kredit yang diberikan	0,29%	0,55%
Kewajiban:		
Tabungan	0,14%	0,17%
Deposito Berjangka	0,00%	0,00%

27 KOMITMEN DAN KONTUJENSI

	2021	2020
Tagihan Kontinjensi :		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian:		
Bunga kredit yang diberikan	391.001.681	336.459.302
Aset produktif yang dihapusbukukan	0	0
Jumlah	391.001.681	336.459.302

28 REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tahun 2021 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tahun 2020.

LAMPIRAN 1

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
RINCIAN KREDIT YANG DIBERIKAN JENIS PENGGUNAAN BERDASARKAN KUALITAS
31 DESEMBER 2021

KETERANGAN	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:						
Modal kerja	0	0	0	0	0	0
Investasi	0	0	0	0	0	0
Konsumsi lainnya	40.461.995	0	0	0	0	40.461.995
Pemilikan kendaraan bermotor	0	0	0	0	0	0
KPR	0	0	0	0	0	0
Sub total	40.461.995	0	0	0	0	40.461.995
Pihak ketiga:						
Modal kerja	7.282.566.757	195.219.549	151.072.500	30.942.225	417.318.779	8.077.119.810
Investasi	1.590.100.414	2.434.106	0	50.349.890	13.329	1.642.897.739
Konsumsi lainnya	3.902.139.507	24.092.904	54.041.088	2.252.827	365.815.845	4.348.342.171
Pemilikan kendaraan bermotor	0	0	0	0	0	0
KPR	0	0	0	0	0	0
Sub total	12.774.806.678	221.746.559	205.113.588	83.544.942	783.147.953	14.068.359.720
Jumlah kredit yang diberikan	12.815.268.673	221.746.559	205.113.588	83.544.942	783.147.953	14.108.821.715
Ditambah Biaya Transaksi yang belum diamortisasi					17.286.625	17.286.625
Dikurangi penyisihan penghapusan kredit					(335.558.525)	(335.558.525)
Dikurangi provisi yang belum diamortisasi					(205.470.241)	(205.470.241)
Jumlah kredit yang diberikan bersih						13.585.079.574

LAMPIRAN 1

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
RINCIAN KREDIT YANG DIBERIKAN JENIS PENGGUNAAN BERDASARKAN KUALITAS
31 DESEMBER 2021

KETERANGAN	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pertanian Padi	8.872.667.171	197.653.655	151.072.500	81.292.115	417.332.108	9.720.017.549
Bukan Lapangan Usaha Lain	3.942.601.502	24.092.904	54.041.088	2.252.827	365.815.845	4.388.804.166
Sub total	12.815.268.673	221.746.559	205.113.588	83.544.942	783.147.953	14.108.821.715
Jumlah kredit yang diberikan	12.815.268.673	221.746.559	205.113.588	83.544.942	783.147.953	14.108.821.715
Ditambah Biaya Transaksi yang belum diamortisasi					17.286.625	17.286.625
Dikurangi penyisihan penghapusan kredit					(335.558.525)	(335.558.525)
Dikurangi provisi yang belum diamortisasi					(205.470.241)	(205.470.241)
Jumlah kredit yang diberikan bersih					13.585.079.574	13.585.079.574

LAMPIRAN 2

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
KUALITAS ASET PRODUKTIF
DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF
31 DESEMBER 2021

No.	Keterangan	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
I	Perhitungan Aset Produktif dan Rasio KAP						
	A. Aset Produktif	12.815.268.673	221.746.559	205.113.588	83.544.942	783.147.953	14.108.821.715
	1. Kredit yang diberikan	0	0	0	0	0	0
	2. Surat-surat berharga	13.001.600.782	0	0	0	0	13.001.600.782
	3. Penempatan pada bank lain (kecuali Giro)	25.816.869.453	221.746.559	205.113.588	83.544.942	783.147.953	27.110.422.497
	4. Jumlah aset produktif	0%	0%	50%	75%	100%	0%
	B. Persentase Bobot Klasifikasi	0	0	102.556.794	62.658.707	783.147.953	948.363.454
	C. Jumlah Aset Produktif yang Diklasifikasikan						3,50
	D. Rasio Aset Produktif yang Diklasifikasikan terhadap Aset Produktif (IC:IA4)x100%						
II	Perhitungan Kewajiban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif*)						
	A. Nilai Agunan Kredit	54.140.966	0	0	0	0	54.140.966
	B. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)						
	C. Dasar Penghitungan PPAP	25.762.728.489	221.746.559	205.113.588	83.544.942	783.147.953	27.056.281.531
	D. Prosentase PPAPWD (sesuai PBI No.8/19/PBI/2006)	0,5%	0,3%	10,0%	50,0%	100,0%	-
	E. Jumlah Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)	0	2.925.760	1.357.302	1.223.499	330.051.964	335.558.525
	F. Jumlah Penyisihan Penghapusan (Lapbul)	0	2.925.760	1.357.302	1.223.499	330.051.964	335.558.525
	G. Jumlah Kekurangan Penyisihan Penghapusan						0
	H. Rasio Penyisihan Penghapusan Aset Produktif terhadap PPAPWD (IIF:IE)x100%						
	I. Prosentase Kolektibilitas Kredit Bruto	90,83%	1,57%	1,45%	0,59%	5,55%	100,00
	J. Prosentase Kredit non Lancar (Netto)			1,44%	0,58%	3,21%	7,60%

LAMPIRAN 3

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO
31 DESEMBER 2021

No.	Keterangan	Nominal (Rp)	Bobot Risiko %	ATMR (Rp)
	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO			
1	Kas	159.110.400	0%	0
2	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	0	0%	0
3	Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat Likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan bagi debet.	0	0%	0
4	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.		0%	0
5	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan.	0	15%	0
6	Penempatan pada bank lain dalam bentuk Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain.	13.001.600.780	20%	2.600.320.156
7	Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.		20%	0
8	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	0	20%	0
9	Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/ rumah toko/ rumah kantor yang dilikat oleh hak tanggungan atau fidusia.		30%	0
10	Kredit kepada BUMN/BUMD	1.300.000.000	50%	650.000.000
11	Bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20%	0	50%	0
12	Kredit kepada pegawai/pensiunan yang memenuhi persyaratan	2.038.394.744	50%	1.019.197.372
13	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia		50%	0
14	Kredit kepada usaha mikro dan kecil	7.378.455.151	70%	5.164.918.606
15	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	0	70%	0
16	Tagihan atau kredit lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko diatas.	2.606.154.366	100%	2.606.154.366
17	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	785.817.454	100%	785.817.454
18	Aset Tetap, Inventaris, dan aset tidak berwujud.	51.842.206	100%	51.842.206
19	AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	73.795.240	100%	73.795.240
20	Aset lainnya selain angka 1 s.d angka 19	301.363.415	100%	301.363.415
	J U M L A H A.T.M.R.	27.696.533.756		13.253.408.815

Keterangan :

- *) Diisi dengan jumlah nominal setelah dikurangi PPAP khusus yang wajib dibentuk oleh BPR (khusus untuk aset produktif dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet).
- **) Diisi dengan jumlah nominal setelah dikurangi PPAP khusus yang wajib dibentuk oleh BPR (khusus untuk aset produktif dengan kualitas Kurang Lancar dan Macet) kecuali Giro.

LAMPIRAN 4

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM (KPMM)
31 DESEMBER 2021

KOMPONEN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	Diperhitungkan (%)	JUMLAH
MODAL			
I. MODAL INTI			
I.1 Modal Inti Utama			
1.1.1 Modal Disetor	8.000.000.000	100%	8.000.000.000
1.1.2 Cadangan Tambahan Modal			
1.1.2.1 Agio	0	100%	0
1.1.2.2 Dana Setoran modal	0	100%	0
1.1.2.3 Modal Sumbangan	0	100%	0
1.1.2.4 Cadangan Umum	802.459.636	100%	802.459.636
1.1.2.5 Cadangan tujuan	802.459.636	100%	802.459.636
1.1.2.6 Laba (Rugi) tahun-tahun lalu	(586.223.080)	100%	(586.223.080)
1.1.2.7 Laba tahun Berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP (Maksimal 50% setelah dikurangi taksiran hutang PPh)	548.249.698	max 50% setelah dikurangi THP	274.124.849
1.1.2.8 Pajak Tangguhan (defferent tax) -/-	0	100%	0
1.1.2.9 Goodwill -/-	0	100%	0
1.1.2.10 Disagio -/-	0	100%	0
1.1.2.11 AYDA			
- AYDA yang telah melampaui 1 (satu) s/d 3 tahun sejak tanggal pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPR -/-		50%	0
- AYDA yang telah melampaui 3 (satu) s/d 5 tahun sejak tanggal pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPR -/-		75%	0
- AYDA yang telah melampaui 5 tahun sejak tanggal pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPR -/-		100%	0
1.1.2.12 Rugi tahun-tahun lalu -/-	0	100%	0
1.1.2.13 Rugi tahun berjalan -/-	0	100%	0
sub total	9.566.945.889		9.292.821.040
I.2 Modal Inti Tambahan			
I.3 JUMLAH MODAL INTI (1.1+1.2)	9.566.945.889		9.292.821.040
II MODAL PELENGKAP			
II.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi sebesar 50% dari modal inti)	0	50%	0
II.2 Surplus revaluasi aset tetap	0	100%	0
II.3 Penyisihan Penghapusan Aset produktif Umum (paling tinggi sebesar 1,25 ATMR)	0	Max 1,25% ATMR	0
II.4 Jumlah Modal Pelengkap (paling tinggi sebesar 100% dr modal inti) (II.1 + II.2 + II.3)	0	Max 100% modal inti	0
II JUMLAH MODAL (1.3 + II.4)			9.292.821.040
Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih PPAP umum			
Selisih lebih PPAP umum yang wajib dihitung dari batasan PPAP umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal (-/-) pelengkap ATMR	0		0,00%
	13.253.408.815		
RASIO KPMM (CAR) = <u>JUMLAH MODAL</u>	9.292.821.040		
ATMR	13.253.408.815		70,12%
Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio KPMM sebesar 12% dari ATMR adalah Rp.0			-
Rasio Modal Inti = <u>Jumlah modal inti</u>	9.292.821.040		
ATMR	13.253.408.815		70,12%
Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio modal inti sebesar 8% dari ATMR adalah Rp.0			0,00

LAMPIRAN 5

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PRAJA
RASIO PERHITUNGAN KESEHATAN BANK
31 Desember 2021

No.	Faktor Komponen Penilaian	31 Desember 2021	
		Jumlah	Rasio
I	Permodalan (CAR)		
a.	Modal	9.292.821.040	
b.	ATMR	13.253.408.815	
c.	Rasio Modal terhadap ATMR		70,12
II	Kualitas Aset Produktif		
1	a. Jumlah aset produktif yang diklasifikasikan	948.363.454	
b.	Jumlah aset produktif	27.110.422.497	
c.	Rasio aset produktif yang diklasifikasikan thd. Aset produktif		3,50
2	a. Jumlah kredit non lancar	1.071.806.483	
b.	Jumlah kredit yang diberikan	14.108.821.715	
c.	Prosentase Kredit non Lancar		7,60
3	a. Jumlah penyisihan penghapusan aset produktif	335.558.525	
b.	Jumlah PPAP. yang wajib dibentuk (PPAPWD)	335.558.525	
c.	Rasio penyisihan penghapusan aset produktif terhadap PPAPWD		100,00
III	Rentabilitas (ROA)		
1	a. Jumlah laba sebelum pajak	548.249.698	
b.	Rata-rata volume usaha/jumlah aset	22.827.858.491	
c.	Rasio laba terhadap total aset (ROA)		2,40
2	a. Jumlah biaya operasional	2.075.595.946	
b.	Jumlah pendapatan operasional	2.651.221.639	
c.	Rasio biaya terhadap pendapatan operasional		78,29
IV	Likuiditas (CR)		
1	a. Jumlah alat likuid	6.480.711.180	
b.	kewajiban lancar	16.006.163.636	
c.	Rasio perbandingan alat likuid dengan kewajiban lancar		40,49
2	a. Jumlah kredit yang diberikan	14.108.821.715	
b.	Jumlah dana yang diterima	24.227.152.806	
c.	Rasio perbandingan kredit terhadap dana yang diterima		58,24

PENUTUP.

Segala puji syukur kehadirat ALLAH tak lupa kami panjatkan, karena hanya atas perkenan-Nya laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, doa dan pengharapan juga kami panjatkan demi memohon curahan rahmat serta berkah-Nya, agar setiap gerak dan langkah kami senantiasa mendapatkan restu dan ridho, sehingga di kesempatan mendatang kami masih dapat bertahan dan kembali menyampaikan laporan serupa.

Kami sadar bila kinerja kami kali ini masih belum memuaskan, dan laporan yang kami sampaikan ini pun masih jauh dari sempurna. Sepenuhnya kami menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dari semua pihak, maka tidak mungkin apa yang kami rencanakan dapat tercapai dengan baik dan memuaskan, serta tak mungkin pula laporan ini dapat terselesaikan secara baik. Oleh karena itu, untuk operasional ke depan, kami tetap memohon dukungan secara moral maupun kedinasan dari Bapak Walikota Blitar agar pada kesempatan-kesempatan tertentu berkenan membantu mempromosikan BPR Artha Praja sebagai satu-satunya bank milik Pemerintah Kota Blitar kepada seluruh jajaran dinas dan instansi yang ada di Pemerintah Kota Blitar, maupun khalayak umum di Blitar Raya. Kami yakin sepenuhnya, dengan bantuan yang Bapak Walikota berikan, BPR Artha Praja akan semakin tumbuh kembang dan bertambah manfaatnya bagi Pemerintah Kota Blitar pada khususnya, dan seluruh masyarakat Kota Blitar pada umumnya.

Demikian Laporan Tahunan PD. BPR ARTHA PRAJA untuk periode 31 Desember 2021 kami susun dan kami sampaikan. Atas segala kekurangan dan kelemahan yang masih terjadi, besar harapan kami semoga otoritas/institusi terkait dan/atau Bapak Walikota berkenan memberikan kritik dan saran serta masukan yang bersifat konstruktif, sehingga untuk kedepannya kami dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.

Mengetahui,
Dewan Pengawas,


Dite Mahargono
Anggota

Blitar, 28 April 2022
PD. BPR ARTHA PRAJA




Elya Dwi Admoko
Direktur Utama